

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PERIZINAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG
BURUNG WALET DI KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru*



Oleh :

**Endah Fela Augusti
NPM: 157310009**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis

dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulianto, S. Ip, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP. M.Si Andriyus. S.Sos. M.Si, selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Andriyus. S.Sos. M.Si, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dukungan serta motivasi sepenuhnya kepada penulis.
6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
8. Bapak/Ibu Kepala dan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
9. Ayahanda Supeno dan Ibunda Eka Ponelia serta adik-adikku Muhammad Asyrofi dan Ariskin Navia tersayang atas curahan kasih sayang, untaian

doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015; terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon seraoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT,
Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Februari 2020

Penulis Ttd.

Endah Fela Augosti

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTARTABEL.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	12
B. Kerangka Pikir.....	40
D. Konsep Operasional Variabel.....	41
E. Operasional Variabel.....	43
F. Teknik Pengukuran.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel.....	46
D. Teknik Penarikan Sampel.....	47
E. Jenis dan Sumber Data	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisis Data	50
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	51
DAFTAR KEPUSTAKAAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 Konsep Operasional Variabel Penelitian implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti	44
III.1 Populasi dan Sampel Penelitian Tentang implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti	47
III.2 Jadwal waktu penelitian tentang implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	51

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Endah Fela Augusti
NPM	: 157310009
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi	: Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagi) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian ususlan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Februari 2020
Pelaku Pernyataan,

Endah Fela Augusti

IMPLEMENTASIKEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERIZINAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ABSTRAK

Oleh
Endah Fela Augusti
NPM : 157310009

Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet menjadi salah satu faktor potensial untuk memajukan perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, namun dengan memiliki banyaknya tempat penangkaran sarang burung walet belum menjamin dapat memberikan masukan yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah disektor budidaya hasil pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti karna banyaknya penangkaran sarang burung walet tersebut yang tidak memiliki izin usaha sarang burung walet, sementara bangunan usaha sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti semangkin lama semangkin banyak. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh usaha burung walet cukup banyak, sehingga dapat mengganggu kenyamanan warga serta dapat pula mendatangkan penyakit Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarng burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti dan hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif; Sampel sebanyak 24 orang yang terdiri dari seluruh pegawai pada 3: dang Perizinan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dan masyarakat yang dilayani oleh aparat dalam pengurusan pengelolaan sarang burung wale. Teknik pengumpulan data kuisioner dan wawancara serta analisis data secara ieskriptif dan kuantitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum berjalan optimal, hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan serta penerapan sanksi yang tegas dari pihak implementor terhadap para pengusaha yang melanggar peraturan yang berlaku. Faktor-faktor penghambat meliputi faktor menial, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan Perda tersebut seperti sosialisasi, pengawaasan serta penerapan sanksi yang tegas dari pihak implementor terhadap para pengusaha yang melanggar Peraturan Daerah ini, faktor eksternal disini terjadi karna kurangnya kesadaran dari masyarakat atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet akan mtingnya izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Perizinan, Pengelolaan

**IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICY ON LICENSING
MAN A CEMENT AND BUSINESS LICENSING BIRD WALETS IN THE
MERANTI ISLANDS DISTRICT**

ABSTRACT

By

**Endah Fela Augusti
NPM: 157310009**

Management and exploitation of swiftlet nests is one of the potential factors to advance the regional economy and open employment for the community, but having many breeding places for swiftlet nests does not guarantee that they can provide greater input on the Regional Original Income in the Meranti Islands agricultural cultivation sector, because of the many breeds of swallow nests that do not have a swallow nest business license, while the swallow nest business building in Meranti Islands Regency is taking a lot of time. The negative impacts caused by the swallow bird business quite a lot, so that it can interfere with the comfort of residents and can also bring disease. The purpose of this study is to find out and explain the implementation of local government policies on management and business licensing of swallow birds in the Meranti Islands Regency and their obstacles. The method used is descriptive and quantitative methods; A sample of 24 people consisting of all employees in the Licensing Division of the Office of Investment and One Stop Integrated Services (DPMPTSP) of Tebing Tinggi District, Meranti Islands Regency and the community served by officials in the management of Wale's nest management. Questionnaire and interview data collection techniques and descriptive and quantitative data analysis. This study concludes that the Implementation of Local Government Policies Against the lagement of Permits for Swallow's Nest in the Regency of the Archipelago of niti is still not running optimally, the results of the study indicate that the lack supervision and the application of strict sanctions by the implementor against entrepreneurs who violate applicable regulations. Inhibiting factors include internal factors, lack of human resources (HR) in carrying out these laws such as tocialization, supervision and application of strict sanctions from the implementor against entrepreneurs who violate this Regional Regulation, external factors here occur due to lack of awareness from the public or the body that carries out magement and exploitation of swiftlet's nests on the importance of permission for swiftlet nest management and business.

Keywords: *Implementation, Policy, Licensing, Management*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah-daerah secara profesional, yang direalisasikan oleh peraturan, pengedaran dan pemanfaatan Sumber Nasional, serta baki keuangan pusat dan regional, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, penyertaan masyarakat, kesamarataan dan keadilan, serta potensi kepelbagaian wilayah, yang dilaksanakan dalam rangka Republik Kesatuan Republik Indonesia. Matlamatnya ialah bahawa kawasan yang berkenaan dapat membangun dirinya sendiri dengan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, sehingga Kegunaan dan Hasil pelaksanaan pembangunan dapat meningkat.

Untuk mengetahui keupayaan rantau ini untuk mengawal dan menguruskan isi rumah, salah seorang daripada mereka ialah dengan melihat keupayaan rantau ini untuk menguruskan kewangannya sendiri. Berkaitan dengan ini, Kerajaan Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan berkesan dan efisien tanpa kos yang mencukupi untuk menyediakan perkhidmatan dan pembangunan, dan kewangan ini ialah salah satu kriteria kriteria untuk mengetahui keupayaan sebenar wilayah untuk menguruskan rumah tangga sendiri.

Pelaksanaan tugas umum dan pembangunan serta tugas melaksanakan peraturan atau peraturan daerah, setiap aparatus pemerintah ditugaskan untuk melaksanakan beberapa tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Walau bagaimanapun, matlamat dan objektif yang mesti dicapai oleh kerajaan sentiasa melibatkan aktiviti atau tugas lebih daripada satu alat kerajaan. Oleh itu, dalam mencapai matlamat dan objektif, pendekatan pelbagai fungsi perlu diambil, yang bermaksud bahawa setiap isu perlu dikaji semula dari pelbagai fungsi kerajaan yang relevan, antara agensi dan antara agensi kerajaan yang relevan. Seiring dengan perkembangan negara dan kerajaan, ajaran kedaulatan undang-undang yang diterima oleh negara-negara di dunia, terutama setelah perang dunia ialah negara kebijakan. Ciri utama negara ini ialah kemunculan kewajipan kerajaan untuk merealisasikan kebijakan masyarakat untuk warganya. Konsep keadaan kebijakan ini, negara diminta menaikkan tanggungjawabnya kepada masalah sosial yang dihadapi oleh banyak orang.

Kerajaan memerlukan dan bahkan campur tangan dalam pelbagai masalah sosial dan ekonomi untuk memastikan penciptaan kemakmuran bersama dalam masyarakat. Selaras dengan matlamat utama untuk setiap negara ialah untuk mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Hasil daripada perkembangan fungsi dan peranan negara dalam kebijakan, peranan kerajaan juga semakin luas. Untuk mengatasi pelbagai masalah sosioekonomi dalam masyarakat, pembangunan ekonomi dirancang dan dilaksanakan secara nasional. Hal ini bertentangan dengan kecenderungan yang terjadi dengan parlemen yang biasanya lebih berorientasi ke arah kepentingan setempat berdasarkan konstituensi yang cenderung terikat pada

kepentingan provinsi. Perkara-perkara seperti ini yang antara lain akan menyebabkan kuasa kerajaan menjadi lebih besar dalam amalan negeri harian. Sehubungan dengan pembangunan ekonomi oleh kerajaan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, pemerintah harus menggunakan kewenangannya sesuai dengan sistem pengawalan yang berlaku sehingga hak masyarakat dalam pemberian izin perusahaan tidak mengecualikan hak-hak yang berkembang di masyarakat.

Tetapi pada hakikatnya banyak permit yang dikeluarkan oleh kerajaan termasuk kerajaan tempatan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, masyarakat sering dirugikan oleh izin syarikat. Kerajaan sering tidak melihat struktur kehidupan masyarakat, tetapi dengan kewibawaannya isu-isu kerajaan hanya dibenarkan untuk kepentingan peribadi pelaku usaha sehingga syarikat menjalankan proses bisnis sewenang-wenangnya. Kemudian prosedur pelesenan rumit bukan masalah baru bagi dunia usaha di Indonesia. Bermula dari masalah duplikasi peraturan sehingga proses perlesenan yang lambat masih merupakan halangan yang sering dihadapi oleh para pelabur. Walaupun ada komitmen dari pemerintah untuk mempermudah proses perizinan bisnis di Indonesia, nampaknya praktiknya masih tidak optimal.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi pulau sebagai jalur perdagangan dan sarana transportasi laut yang besar. Potensi ini menjadikan salah satu hasil Pendapatan Asal Serantau (PAD) dalam sektor levi pelabuhan. Bagi sumber kewangan serantau sebagai hasil dalam pelaksanaan desentralisasi, salah satunya ialah kemampuan daerah untuk mengelola Pendapatan Asal Regional

(PAD) sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2014, bahwa pelaksanaan autonomi daerah yang luas dan utuh ditempatkan di kabupaten dan kota, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi sangat penting dalam mendukung Keuangan Daerah.

Atas sebab ini, ialah perlu bagi pemerintah Kepulauan Meranti di Kepulauan Meranti melalui Pengurusan Daerah dan Pengurusan Aset Wilayah Meranti untuk melakukan berbagai upaya untuk menjelajahi potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan rantau. Satu sumber Pendapatan Daerah Daerah Kepulauan Meranti yang harus dipertimbangkan untuk manajemen ialah dari sektor Pajak Daerah.

Pengurusan dan eksploitasi sarang menelan menjadi salah satu faktor yang berpotensi untuk memajukan ekonomi serantau dan membuka peluang pekerjaan untuk komuniti, tetapi mempunyai banyak alasan pembiakan menelan tidak menjamin mereka dapat memberikan masukan yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam sektor produk pertanian di Kepulauan Meranti Kepulauan. kerana banyak jenis sarang menelan yang tidak mempunyai lesen perniagaan sarang menelan, sementara bangunan perniagaan sarang burung walet di Kabupaten Meranti mengambil banyak masa.

Kesan negatif yang disebabkan oleh perniagaan burung menelan cukup banyak, sehingga dapat mengganggu kenyamanan penduduk dan juga dapat membawa penyakit. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti mengatur eksploitasi sarang menelan melalui bentuk Peraturan Pemerintah Kabupaten Meranti No. 118 dari 2018 mengenai prosedur dan arahan pelaksanaan

izin pengelolaan dan pengawasan pengelolaan sarang dan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta prosedur kerja Kantor Investasi, Layanan Pensiun Satu Pimpinan dan Pekerja Daerah Kepulauan Meranti. Permit Pengurusan dan Eksplorasi Nest Swallow yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti ialah untuk mengawal usahawan burung menelan agar dapat mewujudkan regulasi pemilik administrasi dan pemilik usaha yang reguler yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Meranti.

Pejabat Pelaburan dan Perkhidmatan Bersepadu (DPMPTSP) Daerah Tebing Tinggi, Kabupaten Meranti Kepulauan ialah salah satu agensi yang menjalankan pengurusan izin usaha dompet sarang burung. Berikut ini boleh dilihat prosedur operasi standard (SOP) dalam pengurusan menelan dan permit perniagaan:

1. Persyaratan

- a. Permohonan diatas materai Rp. 6.000
- b. FC KTP Direktur/Direktris
- c. Surat Keterangan Bangunan /IMB
- d. Izin Lingkungan/SPPL
- e. Pertimbangan Teknis dari Badan Lingkungan Hidup
- f. Pas photo ukuran 3x 4 berwarna 3 lembar
- g. Surat Pernyataan bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku dan bersedia diberikan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban dan larangan yang diberikan berrnaterai Rp. 6000
- h. FC tanda lunas pembayaran pajak hasil,retribusi dan tanda lunas PBB
- i. Foto Copy SITU

2. Biaya Pengurusan

Tidak ada dikenakan biaya

3. Mekanisme Pengurusan

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
	Pemohon datang, petugas penyapa dan mengarahkan ketempat duduk antrian							
	Pemohon mengajukan berkas persyaratan kepada petugas loket							
	Petugas ioket memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan							
	Pengolah data mempersiapkan berkas dan kelengkapan							
	Kasi Petayanan mengajukan kepada Sekcam/Camat setelah berkas persyaratan lengkap							
	Sekcam mengajukan kepada Camat seteia berkas persyaratan lengkap							
	Camat menandatangani berkas							
	Petugas Loket mertyerahkan berkas kepada pemohon setetah membayar retribusi							

4. Sanksi

Setiap individu atau entiti yang telah menjalankan pengurusan sarang burung walet dan perniagaan, tetapi belum memiliki pengurusan sarang burung walet dan permit eksplorasi dari Ketua Pulau Pelesenan Meranti Kepulauan Pelesenan Pelaburan Bersepadu Bersepadu, boleh diberikan dispensasi atau pemutihan izin dan kewajiban pembayaran cukai atau levi di atas tanah yang terhutang.

Dari data yang diperoleh dari Lembaga Pelayanan Pelaburan dan Perizinan Bersepadu di Kepulauan Meranti pada tahun 2017 terdapat 3000 jenis dompet sarang burung tetapi hanya 529 ekor sarang burung walet yang tercatat di Jabatan

Pengambilalihan dan Pengelolaan Aset Keuangan Kepulauan Meranti, terdapat lebih banyak pembibakan sarang burung menelan yang boleh digunakan sebagai objek cukai pendapatan untuk pendapatan tempatan. Peningkatan sasaran yang mencapai 100 peratus tidak berjalan seperti yang dirancang, disebabkan oleh penurunan dalam harga jual sarang burung walet di pasaran dunia, yang sangat penting sebagai faktor utama dalam mencapai sasaran pencapaian sasaran menelan sejauh mana yang diharapkan dan dari bulan Januari hingga September pencapaian sarang burung walet hanya Rp. . 49,656,100.

Tidak semua item cukai yang diuruskan oleh kawasan di atas boleh diuruskan dengan baik, termasuk Cukai Burung Sarang Burung Swallow yang merupakan cukai untuk pengumpulan sarang burung walet atau kegiatan eksploitasi. Penentuan cukai sarang burung walet sebagai jenis cukai Kabupaten / Kota bukan sesuatu yang baru, sebelum ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai daerah utama. Oleh karena itu, peraturan pajak sarang burung walet dalam Undang-Undang No. 28/2009 pada dasarnya ialah penegasan peraturan hukum untuk mengumpulkan pajak penanaman sarang menelan di Indonesia. Jadi sektor penanaman sarang burung walet ialah objek pajak daerah, yang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 10 tahun 2011 mengenai Cukai Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penanaman sarang burung walet sangat baik untuk penduduk Kepulauan Meranti, terutamanya di kawasan Kota Selatpanjang. Di bawah ini telah melampirkan jumlah sarang burung tunas untuk 2017-2018:

Tabel I.1 Jumlah Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Penangkaran	Tahun	
		2017	2018
1	Tebing Tinggi	297	300
2	Tebing Tinggi Barat	19	18
3	Tebing Tinggi Timur	-	32
4	Rangsang	132	125
5	Rangsang Barat	17	17
6	Merbau	33	37
JUMLAH		498	529

Sumber: Data olahan DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018

Data yang dilampirkan di atas ialah sejenis baka pembiakan sarang burung walet pada tahun 2017-2018, dari data yang dapat dilihat bahawa jumlah pembiakan sarang menelan yang tercatat di DPMPTSP Kabupaten Meranti Kepulauan ialah 498 usahawan sarang menelan. Kemudian data mengenai jumlah ternakan sarang menelan yang tercatat di DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2017 ialah 529 Penangkapan Sarang Swallow. Penanaman sarang burung walet menjadi sangat baik bagi penduduk Kepulauan Meranti, khususnya kawasan Selat Panjang. Dalam tempoh 10 tahun dari tahun 2000 sehingga kini telah membiak beratus-ratus pembiakan menelan. Ini disebabkan permintaan komoditi sarang burung yang dieksport ke Singapura dan Hong Kong (China). Di tempat ini, harga sarang menelan untuk kualiti terbaik dapat mencapai 20 juta per kilo gram (Kg), walaupun dikatakan bahawa corak perdagangan melalui pasar gelap, pedagang atau pengantara biasanya datang langsung ke lokasi pengeluar sarang burung dan harganya ialah 9-12 juta per kilo gram (kg). Pada masa ini, harga sarang menelan sedang mengalami penurunan yang hanya berkisar antara 3-6 juta kilo gram (Kg), yang menjelaskan kesedaran

rendah dan sasaran Pendapatan Asal Serantau yang tidak dapat dicapai dari kutipan cukai sarang burung menelan.

Nilai rendah harga sarang burung walet ialah kerana di Indonesia tidak ada syarikat atau institusi yang menyelaras untuk mengeksport produk sarang burung walet di luar negeri. Kemudian ia dilaporkan di negara penggunaan tinggi iaitu China yang mengurangkan penggunaan sarang menelan yang disebabkan oleh salah seorang pengguna yang mati akibat keracunan daripada bahan kimia yang dicampur dengan dompet sarang burung pemutih oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Nilai ini jauh berbeza jika sarang burung walet diuruskan oleh syarikat yang menjamin kualiti pengeluarannya. Potensi sarang menelan di atas ialah objek cukai yang sangat penting dalam menyumbang pendapatan serantau. Atas sebab ini, cukai tempatan mesti diterokai, diurus dan dibangunkan mengikut potensi yang sedia ada. Dengan pengendalian atau pakar profesional, sasaran itu akan mudah dicapai, terutama cukai sarang burung walet.

Satu perkara yang perlu diperhatikan ialah cukai sarang burung burung walet yang tidak disasarkan kepada Kepulauan Kepulauan Meranti yang dikatakan belum optimum untuk mekanisme kerja Pejabat Pelaburan dan Perkhidmatan Terpadu Satu Wilayah Kepulauan Meranti sebagai unit kerja dan bertanggungjawab unit kerja yang berkaitan dengan kegiatan koleksi cukai sarang burung walet belum dapat mencapai standard penerimaan mengikut sasarannya. Tiada yuran untuk mengendalikan permit perniagaan sarang burung walet melainkan cukai iklan yang dibayar di Knator Service Revenue Regional.

Walaupun pihak berkuasa untuk mengeluarkan lesen ialah Ketua Perkhidmatan DMPTSP. Fenomena yang telah dipenuhi semasa pemerhatian lapangan termasuk:

1. Menunjukkan bahawa banyak baka sarang burung yang tidak mempunyai lesen, berdasarkan pemerhatian dan pemerolehan data, diketahui bahawa terdapat 124 perniagaan yang tidak mempunyai izin. Ini tidak disusuli oleh agensi kerana pemilik perniagaan dikekang di luar bandar dan di luar negara dengan kediaman yang tidak tetap sehingga sukar untuk direkodkan.
2. Penunjuk lokasi sarang burung walet di tengah-tengah penyelesaian, contohnya perniagaan burung dompet yang terletak di Jalan Alah Air dan Jalan Imam Bonjol serta jalan dominan lain di mana dompet sarang burung berdekatan dengan rumah penduduk sehingga dapat mengganggu ketenangan penduduk sekitarnya.
3. Ketiadaan tindakan tegas terhadap pemilik sarang menelan yang tidak mempunyai permit, ini ialah kerana pemahaman rendah tentang usahawan sarang burung dompet mengenai peraturan dan undang-undang dan perdebatan yang kerap dengan pegawai cukai.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan judul: **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian iaitu :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarng burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarng burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarng burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Untuk mengetahui hambatan - hambatan implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarng burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan teoritis, kajian ini diharapkan dapat dilihat sebagai salah satu karya ilmiah yang juga menyokong perkembangan sains kerajaan, terutama mengenai pelesenan.

2. Kegunaan Akademik, hasil kajian ini dijalankan untuk menjadi berguna dalam bidang sains, khususnya sains kerajaan dan boleh dipertimbangkan dalam kajian yang sama.
3. Penggunaan praktikal, sebagai bahan pertimbangan dan kajian / masalah bagi Jabatan Pelabuhan dan Perkhidmatan Bersepadu dari Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengelolaan izin pengelolaan dan eksplorasi burung menelan di Kabupaten Kepulauan Meranti.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka rujukan untuk berfikir dalam menyelesaikan masalah utama yang dicadangkan dalam kajian ini penulis akan menerangkan konsep atau teori yang mempunyai kaitan untuk menyokong penyelesaian masalah yang dinyatakan di atas.

Untuk menjelaskan konsep-konsep dalam kajian ini, penulis menyusun beberapa pendapat pakar selaras dengan objektif kajian. Teori yang digunakan ialah satu siri kajian yang akan diselesaikan pada masalah untuk mendapatkan hasil yang baik.

Menurut Ndraha (2003: 7) sains kerajaan dapat didefinisikan sebagai kajian tentang bagaimana untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang untuk layanan publik dan pelayanan awam, dalam hubungan pemerintah, bila diperlukan oleh pihak yang bersangkutan. Sains tadbir urus kajian tadbir urus dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya, dan kedua dari sudut bagaimana sebenarnya.

Kerajaan ialah fenomena sosial, yang bermakna ia berlaku dalam hubungan antara anggota komuniti, individu dan individu, kumpulan dan kumpulan dan antara individu dan kumpulan (Ndraha, 1997: 6)

Menurut Ndraha, (1997: 17) Sains kerajaan ialah kajian bagaimana kerajaan (unit kerja) berfungsi untuk memenuhi dan melindungi bimbingan (harapan, kebutuhan) yang ditadbir oleh perkhidmatan awam dan perkhidmatan awam dalam hubungan pemerintah. Tambahan pula, Ndraha berhujah bahawa kerajaan boleh diklasifikasikan kepada dua kumpulan luas, iaitu kerajaan sepusat dan dekonsentrasi. Kerajaan dekonsentrasi dibahagikan kepada kerajaan tempatan dan asing. Kerajaan dalam negeri dibahagikan kepada kerajaan pusat dan terpencil. Kerajaan pusat boleh ditentukan sebagai kerajaan umum dan bukan kerajaan umum. Termasuk dalam kerajaan umum ialah pertahanan, keamanan, keadilan, urusan luar negeri dan moneter.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kerajaan ialah fenomena yang kompleks dan berkembang seiring dengan dunia. Ia menjadi bermakna apabila ia mampu memberikan makna yang paling luas kepada manfaat ramai orang. Keadaan ini memerlukan kerajaan dapat membangun sebagai cara menguruskan hayat bersama yang bermanfaat dan diterima secara universal melalui pengagihan nilai yang adil dan saksama. Dengan

pemahaman ini, penglibatan semua orang sebagai benefisiari dalam semua proses kerajaan dijangka dapat melahirkan kebajikan yang dapat dinikmati oleh semua orang. Tanpa itu, kerajaan dilihat sebagai segala-galanya yang lain, yang boleh memberi kesan buruk dan menderita di mana-mana.

Seperti yang kita ketahui, dalam kajian sains politik fenomena kerajaan ialah bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari pusaran kuasa. Malah menurut Kuper (2000: 418), istilah pemerintah (pemerintah) dan semua bentuk implikasinya ialah pusat kajian sains politik. Itulah sebabnya mengapa sains kerajaan secara amnya sukar untuk berpisah daripada bayang-bayang sains politik (Ndraha, 1999: 7).

Kerajaan ialah gejala yang lebih umum daripada istilah kerajaan sendiri. Kerajaan menunjukkan aktiviti kuasa dalam pelbagai bidang awam. Ia bukan sahaja merujuk kepada kerajaan sendiri, tetapi juga berkaitan dengan aktiviti dalam pelbagai konteks institusi dengan tujuan untuk mengarah, mengawal, mengawal selia semua perkara yang berkaitan dengan bidang awam seperti kepentingan rakyat, pengundi dan pekerja (pekerja). Jika peranan kerajaan terhad kepada pihak berkuasa politik semata-mata untuk mengekalkan keamanan dan ketenteraman awam melalui fungsi eksekutifnya, menurut Kuper (2000: 417), kerajaan merujuk lebih banyak kepada proses mengurus politik, gaya atau model menangani masalah awam dan menguruskan sumber-sumber awam. Dalam konteks itu, menurut Robinson terdapat sekurang-kurangnya 3 nilai penting yang menjadi pusat perbincangan pemerintah, iaitu; akauntabiliti, legitimasi, dan ketelusan. Akauntabiliti ialah berkaitan dengan seberapa berkesan pengaruh

mereka yang ditadbir terhadap mereka yang memerintah. Atau dalam bahasa biasa ialah berapa tahap kepercayaan (amanah) masyarakat terhadap kerajaan mereka.

Legitimasi menunjukkan hak negara untuk melaksanakan kuasa ke atas warganya dan setakat mana kuasa tersebut dianggap sah untuk digunakan. Ini berkait dengan betapa munasabah dan bersesuaian kuasa kerajaan patut bersenam, memandangkan kerajaan ialah produk dan perwakilan masyarakat itu sendiri.

Ketelusan ialah berkaitan dengan bagaimana membuka keadaan dalam mewujudkan mekanisme untuk memastikan akses awam kepada membuat keputusan. Ini berkait dengan berapa banyak penglibatan masyarakat dalam proses membuat keputusan yang meyakinkan mereka sebagai sebahagian daripada segala akibat yang akan berlaku (Muhammad Labolo: 2010,20) Kerajaan juga merupakan aktiviti institusi awam dalam melaksanakan fungsi mereka untuk mencapai matlamat Negara, dan mereka yang menjalankan pemerintahan dipanggil pemerintah. Secara umumnya, tugas utama kerajaan mengikut Rasyid (1997: 13) termasuk:

1. Untuk menjamin keselamatan Negara dari semua kemungkinan serangan dari luar dan untuk mencegah pemberontakan daripada berlaku di mana dapat menggulingkan kerajaan yang sah melalui cara yang ganas.
2. Memilih perintah dengan menghalang keributan di kalangan ahli komuniti, memastikan perubahan dalam radas yang berlaku di dalam masyarakat dapat berlangsung dengan aman.
3. Peraturan yang adil kepada setiap anggota masyarakat tanpa mengira status latar belakang kewujudannya.

4. Melaksanakan perkhidmatan awam dengan menyediakan perkhidmatan dalam bidang yang tidak mungkin dilakukan oleh organisasi non-pemerintah
5. Buat usaha untuk memperbaiki kebajikan sosial.
6. Melaksanakan dasar ekonomi yang memberi manfaat kepada masyarakat yang lebih luas.
7. Melaksanakan dasar untuk pemilihan sumber semula jadi dan alam sekitar.

Tambahan pula, Strong di Syafie (2005: 22) menyatakan bahawa kerajaan bermaksud dalam erti kata yang luas mempunyai kuasa untuk menjaga keamanan dan keselamatan Negara, di dalam dan di luar. Oleh itu, pertama, ia mesti mempunyai kuasa tentera, atau keupayaan untuk mengawal tentera, kedua, ia mesti mempunyai kuasa perundangan atau, dalam arti membuat undang-undang, ketiga, ia mesti mempunyai kekuatan kewangan atau keupayaan untuk memenuhi kewangan awam untuk membiayai kos kewujudan Negara dalam melaksanakan peraturan, ini dalam konteks pelaksanaan kepentingan Negara.

Sains kerajaan ialah sekumpulan orang yang diberi kuasa undang-undang oleh masyarakat setempat untuk menjalankan peraturan interaksi yang berlaku dalam persatuan masyarakat (antara individu dan individu, individu dengan institusi kerajaan, agensi kerajaan dengan pihak swasta, dan pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi keperluan dan keperluan kehidupan seharian, supaya interaksi dapat berjalan dengan harmoni. (Nurcholis, 2005: 112)

Kerajaan secara ketat ialah eksekutif yang menjalankan fungsi menjalankan undang-undang, iaitu sekumpulan orang yang diberi tugas

perancangan, pengumpulan, penganjur, penganjur, penggerak, dan mengarahkan semua usaha rakyat / penduduk suatu Negara untuk mencapai matlamat negara yang dinyatakan.

2. Konsep Pemerintah Daerah

Pindaan 4 (empat) UUD 1945 menyatakan secara jelas tentang bentuk dan komposisi pemerintahan daerah dalam kerangka Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi: "Republik Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi dan provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota, masing-masing memiliki provinsi, kabupaten dan kota, yang memiliki wilayah pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang".

Sederhana Perkara 18 perenggan (5) Perlembagaan 1945 menyatakan bahawa: "Kerajaan daerah ialah daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan secara luas dan berhak mengatur wewenang pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang secara hukum ditetapkan sebagai urusan pemerintahan pusat".

Takrif Kerajaan Daerah dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang artikel pemerintah daerah 1 ayat 2, ialah sebagai berikut: "Pemerintah Daerah ialah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan prinsip tugas otonomi dan bantuan dengan prinsip otonomi seluas mungkin dalam sistem dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Perlembagaan Republik Indonesia 1945.

Melihat takrif kerajaan serantau seperti yang dinyatakan di atas, apa yang dimaksudkan oleh pemerintah daerah di sini ialah pelaksanaan daerah otonom

oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan prinsip desentralisasi di mana unsur-unsur pemerintahan pemerintah daerah ialah Gubernur, Bupati atau Walikota dan aparatur daerah.

Fungsi pemerintah daerah dapat ditafsirkan sebagai aparat daerah yang menjalankan, mengatur dan mengatur pelaksanaan pemerintah. Fungsi pemerintah daerah mengikut Undang-undang No. 32 tahun 2004 ialah:

1. Kerajaan serantau mengawal dan mengurus urusan pemerintahan sendiri mengikut prinsip tugas otonomi dan bantuan.
2. Menjalankan autonomi yang luas, kecuali hal ehwal kerajaan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kebijakan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah.
3. Pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan mempunyai hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di mana hubungannya termasuk kuasa, kewangan, perkhidmatan awam, penggunaan sumber semula jadi, dan sumber-sumber lain.

Prinsip desentralisasi di pemerintahan daerah di Indonesia dapat dijawab sebagai hubungan hukum sipil, di mana ada pemindahan hak-hak dari pemilik hak kepada penerima hak tertentu, dengan objek tertentu. Pemilik hak pemerintah berada di tangan pemerintah, dan hak pemerintah tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan tujuan hak menjadi kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, sementara dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari sudut pandangan pentadbiran kerajaan, desentralisasi bertujuan untuk mengurangkan beban kerja Pemerintah Pusat. Dengan tugas dan kerja desentralisasi dipindahkan ke daerah. Oleh itu, Kerajaan Pusat memberi tumpuan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan negara atau negara secara keseluruhan.

3. Kebijakan Pemerintahan

Untuk menyelesaikan, mengurangkan atau menghalang berlakunya masalah, kita memerlukan dasar yang dirumuskan dengan mempunyai fungsi dan tujuan tertentu, di mana untuk mencapai matlamat dan objektif dasar tertentu memerlukan pelaksanaan dasar itu sendiri yang merupakan proses selanjutnya dari tahap penggubalan dasar kes ini selaras dengan pendapat (Abidin, 2002; 20). Ramai pakar mengatakan bahawa dasar kerajaan sebagai kuasa memperuntukkan nilai-nilai untuk masyarakat keseluruhannya. Ini mengandungi konotasi pihak berkuasa kerajaan yang merangkumi seluruh kehidupan rakyat. Tiada organisasi lain yang pihak berkuasa termasuk seluruh masyarakat. Tiada organisasi lain yang pihak berkuasa termasuk seluruh masyarakat kecuali kerajaan.

Menurut Carl Friedman, perkara yang paling penting untuk dasar ialah tujuan (matlamat), target (objektif), atau tujuan (tujuan). (Abidin, 2002; 20) Menurut Ndraha (2003; 493-494), kebijakan merupakan pilihan terbaik dalam usaha memproses nilai pemerintah yang berdasarkan kebijaksanaan di sempadan kompetensi pelaku atau institusi yang relevan dan mengikat tanggungjawab formal, etika, dan moral dan ditujukan untuk memenuhi akuntabilitas jawapan kepada pelakon kerajaan dalam persekitaran kerajaan.

Tindakan dasar ialah aktiviti yang diarahkan ke arah tujuannya, sebagai mempunyai ciri-ciri sendiri dari aktiviti fizikal dan ekspresif yang tulen, yang bertujuan untuk mempengaruhi alternatif (calon) yang akan datang dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 2003; 6)

Menurut Koryati (2005: 7), secara umum dasar itu boleh dikatakan sebagai perumusan keputusan kerajaan yang membimbang tingkah laku untuk menangani masalah awam yang mempunyai objektif, rancangan dan program yang akan dilaksanakan dengan jelas.

Kemudian Ibrahim (2004: 2) berhujah bahawa dasar itu merupakan prosedur untuk membuat sesuatu berdasarkan peraturan tertentu, tetapi juga menyatakan bahawa dasar itu merupakan bentuk dasar (praktikal) yang nyata. Dasar awam menurut Dwijowijoto (2008; 58) ialah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk mewujudkan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik ialah strategi untuk mengambil masyarakat pada tahap awal, memasuki masyarakat dalam masa transisi, untuk pergi ke masyarakat yang bercita-cita.

Menurut Friedrick (dalam Dwijowijoto, 2008; 53) mentakrifkan dasar sebagai satu siri tindakan yang dicadangkan oleh seseorang, kumpulan, atau kerajaan dalam persekitaran tertentu, dengan ancaman dan peluang yang dimaksudkan oleh kebijakan yang diajukan untuk mengeksplotasi potensi sambil mengatasi hambatan yang ada untuk mencapai tujuan khusus. Menurut Thomas (di Dwijowijoto, 2008; 54) Dasar awam ialah seperti segala

yang dilakukan oleh kerajaan, mengapa mereka melakukan hasil yang membuat hidup bersama kelihatan berbeza.

Menurut Easton, Dasar Pemerintah ialah "Kuasa untuk memperuntukkan nilai untuk masyarakat secara keseluruhan, yang bermaksud bahawa kuasa untuk mengawal kepentingan keseluruhan masyarakat ialah pemerintah. Dalam (Lubis, 2007; 8)

Sementara itu, menurut Nugroho (2004: 101) bahawa penggubalan dasar ialah teras dasar awam yang dilihat dari dasar-dasar awam yang bertujuan untuk campur tangan dalam kehidupan awam untuk meningkatkan kehidupan masyarakat itu sendiri sebagaimana dinilai dari kemampuan kemampuan sumber daya manusia.

Oleh itu, ia boleh dibuat berdasarkan pendapat di atas bahawa apa yang dipanggil dasar kerajaan ialah perumusan dalam bentuk keputusan tetap yang dikeluarkan oleh kerajaan dan secara amnya terpakai untuk mempengaruhi objektif dalam arah yang dikehendaki, demi kepentingan awam.

4. Konsep Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

Menurut Suryadi (1975: 64), pengambilan dasar ialah aktiviti yang diarahkan ke arah tujuannya, kerana ia mempunyai ciri-ciri sendiri dari aktiviti fizikal dan menyeluruh yang bertujuan untuk mempengaruhi alternatif (calon) yang akan datang dalam arah yang dikehendaki.

Menurut Van Meter dan Horn (1974) dalam buku Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012: 20-21) mendefinisikan Perlaksanaan lebih khusus, iaitu: "Pelaksanaan Kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu

atau individu (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian matlamat yang ditetapkan dalam keputusan dasar terdahulu "yang bermaksud Pelaksanaan ialah tindakan oleh individu, pegawai, atau kumpulan badan kerajaan yang diarahkan untuk mencapai matlamat yang digariskan dalam keputusan tertentu. Agensi-agensi ini menjalankan kerja-kerja kerajaan yang memberi impak kepada warga negara mereka.

Menurut Pressman dan Wildavsky (2012: 20) dalam Pelaksanaan Dasar Awam, definisi Pelaksanaan ialah untuk menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan (tocarryout), untuk memenuhi janji-janji yang dinyatakan dalam dokumen dasar (tofulfill), untuk menghasilkan output seperti yang dinyatakan dalam objektif dasar (toproduce)) untuk menyelesaikan misi yang mesti direalisasikan dalam objektif dasar (tidak lengkap).

Dunn (2003: 22) berhujah bahawa proses membuat dasar ialah satu siri aktiviti intelektual yang dijalankan dalam proses yang pada dasarnya bersifat politik. Kegiatan politik dijelaskan sebagai satu siri tahap saling bergantung yang diatur dalam susunan kronologi, penetapan agenda, perumusan dasar, pengambilan dasar, pelaksanaan dasar dan penilaian dasar. Kemudian membuat dasar ialah satu aktiviti yang diarahkan ke arah matlamat, kerana ia mempunyai ciri-ciri sendiri dan aktiviti fizikal dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalam arah yang dikehendaki. Hessel selanjutnya menyatakan bahawa pembangunan dasar lebih luas dan berkaitan dengan peningkatan pengambilan keputusan antara kerajaan secara keseluruhan.

Sementara itu, Suharto (2005: 7) menyatakan bahwa dasar itu merupakan peruntukan yang mengandungi prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dirancang dan konsisten dalam mencapai matlamat tertentu. Setiap dasar yang perlu dibuat mesti mempunyai tanda aras supaya setiap dasar awam boleh berjalan dengan berkesan.

Menurut Soetopo (2005: 10) dasar awam ialah dasar yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Dasar awam bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang wujud dalam masyarakat. Kemudian Kaplan mentakrifkan dasar awam sebagai program yang diunjurkan dengan matlamat tertentu, nilai tertentu dan amalan tertentu. Tambahan pula Friedrik berkata dasar awam ialah satu siri tindakan yang dicadangkan oleh seseorang, kumpulan atau kerajaan dalam persekitaran tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Dan dasar kerajaan ialah percubaan untuk memproses nilai-nilai kerajaan yang berdasarkan kebijaksanaan kerajaan dan secara formal, etis dan moral yang terikat, yang diarahkan untuk menduduki tanggungjawab pelaku-pelaku pemerintah dalam lingkungan pemerintah (dalam Islam, 1997).

Menurut Anderson merumuskan dasar sebagai satu siri tindakan yang memiliki tujuan khusus yang dilakukan sejumlah pelaku (pejabat, kelompok dan instansi pemerintah) dengan adanya masalah atau masalah yang dihadapi (Wahab, 2004: 13). Sementara Van Doom dan Lammer (dalam Hogerwerf, 1983: 7) mengemukakan kebijaksanaan sebagai rencana tindakan, susunan tujuan dan objektif.

Menurut Friedrik (dalam Syafi'ie, 2005: 107) dasar kerajaan ialah tindakan yang dicadangkan oleh seseorang, pemerintah dalam lingkungan, ketertiban politik mengenai halangan, peluang yang dapat diatasi, mengeksplorasi kebijakan dalam mencapai tujuan, mewujudkan tujuan. Menurut Hogerwerf, kebijaksanaan membina masyarakat yang diarahkan oleh penggunaan kuasa. Sementara Anderson mengatakan kebijaksanaan itu ialah sebagai tindakan khusus yang ditujukan, diikuti oleh pelaku atau sebilangan pelaku yang berkaitan dengan masalah tertentu di tangan.

Menurut Parker (dalam Wahab, 2004: 140) Dasar negara ialah matlamat tertentu atau siri tertentu atau dilaksanakan oleh pemerintah pada waktu tertentu berkaitan dengan subjek atau respons terhadap situasi kritis. Sementara itu, menurut Wood, dasar Negeri ialah satu siri arahan atau perintah dari pembuat dasar yang bertujuan untuk melaksanakan dasar-dasar yang menjelaskan tujuan dan cara untuk mencapai matlamat ini (dalam Wahab, 2004: 31). Menurut Irfan (1991: 17), polisi ialah satu siri tindakan yang dicadangkan oleh seseorang, kumpulan atau kerajaan dalam persekitaran tertentu dengan menunjukkan halangan dan peluang bagi dasar yang dicadangkan untuk mencapai matlamat.

Dasar awam mengikut Nugroho (2007: 36-37) ialah keputusan pihak berkuasa negeri yang bertujuan mengawal kehidupan bersama. Tujuan dasar awam boleh dibezaikan dari segi sumber, iaitu antara dasar awam yang bertujuan mengagihkan sumber negeri dan bertujuan untuk menyerap sumber negara.

Analisis dasar ialah pemahaman mendalam tentang dasar atau penilaian untuk merumuskan dasar.

Analisis dasar mempunyai dua dimensi iaitu, Pertama, dimensi saintifik, iaitu analisis dasar dalam pengertian pemahaman mendalam tentang suatu kebijakan ialah dimensi saintifik. Dalam kes ini, analisis dasar dijalankan untuk meneliti dasar yang telah dibuat dan dilaksanakan dengan terperinci bahagiannya, memahami hubungan antara bahagian-bahagian dan mencari makna dasar dari analisis. Kedua, dimensi amalan, dalam analisis dasar dimensi ini dibuat sebagai usaha awal untuk membuat dasar. Analisis dasar ialah amalan yang dijalankan oleh penganalisis dasar profesional yang bekerja di institusi negeri atau kerajaan dalam kedudukan sebagai pekerja negeri dan perunding institusi tersebut. Model pendekatan pelaksanaan dasar yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn disebut Model Model Pelaksanaan Dasar (1975). Proses pelaksanaan ini merupakan abstraksi atau prestasi penjelmaan dasar yang pada dasarnya sengaja dijalankan untuk mencapai prestasi tinggi pelaksanaan dasar yang terjadi dalam hubungan berbagai pembolehubah. Model ini mengandaikan bahawa pelaksanaan dasar berjalan lurus dari keputusan politik, pelaksana dan prestasi dasar awam. Model ini menjelaskan bahawa prestasi dasar dipengaruhi oleh beberapa pembolehubah saling berkaitan, pembolehubah ini, iaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

a. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Pencapaian pelaksanaan dasar dapat diukur dengan tingkat kejayaan ukuran dan tujuan kebijakan yang realistik dengan budaya sosio pada tingkat pelaksanaan kebijakan. Apabila ukuran dan objektif dasar terlalu ideal (utopian), sukar untuk direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (di Sulaeman, 1998) mencadangkan agar untuk mengukur prestasi pelaksanaan dasar, tentu saja, mengesahkan standard dan sasaran tertentu yang mesti dicapai oleh pelaksana polisi, prestasi dasar pada dasarnya merupakan penilaian tahap pencapaian piawaian dan sasaran ini. Memahami tujuan umum objektif standard dan dasar ialah penting.

Pelaksanaan dasar yang berjaya, boleh menjadi kecewa apabila pegawai (pegawai), tidak sepenuhnya menyedari standard dan objektif dasar tersebut. Standard dan objektif dasar mempunyai hubungan rapat dengan pelupusan pelaksana. Arah pelupusan pelaksana (pelaksana) terhadap piawaian dan objektif dasar juga merupakan "perkara penting". Pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan dasar, kerana mereka menolak atau tidak memahami apa tujuan dasar (Van Mater dan Van Horn, 1974).

b. Sumber daya

Kejayaan pelaksanaan dasar bergantung kepada keupayaan untuk menggunakan sumber yang tersedia. Manusia ialah sumber yang paling penting dalam menentukan kejayaan pelaksanaan dasar. Setiap tahap pelaksanaan memerlukan sumber manusia yang berkualiti sesuai dengan pekerjaan yang diperlukan oleh kebijakan yang ditentukan secara apolitik. Di samping sumber manusia, sumber kewangan dan masa menjadi pengiraan penting dalam keberhasilan pelaksanaan dasar. Seperti yang dinyatakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahawa: "Kajian bandar baru menunjukkan bahawa bekalan terhad insentif persekutuan ialah penyumbang utama kegagalan program".

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menekankan bahawa: "Sumber dasar tidak kurang penting daripada komunikasi. Sumber-sumber dasar ini juga mesti disediakan untuk memudahkan pentadbiran pelaksanaan dasar. Sumber-sumber ini terdiri daripada dana atau insentif lain yang dapat memudahkan pelaksanaan (pelaksanaan) suatu polisi. Dana yang kurang atau terhad atau insentif lain dalam pelaksanaan dasar, ialah sumbangan utama kepada kegagalan pelaksanaan dasar. "

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Tumpuan perhatian terhadap agensi pelaksana termasuk organisasi formal dan tidak formal yang akan terlibat dalam melaksanakan dasar tersebut. Ini penting kerana prestasi pelaksanaan dasar akan dipengaruhi oleh ciri-ciri yang sesuai dan sesuai dengan agensi pelaksana. Ini berkaitan dengan konteks dasar yang akan dilaksanakan dalam beberapa dasar yang diperlukan dengan

melaksanakan dasar yang ketat dan berdisiplin. Dalam konteks lain, ejen pelaksana demokratik dan persuasif diperlukan. Di samping itu, liputan atau kawasan kawasan merupakan pertimbangan penting dalam menentukan ejen pelaksana dasar.

Menurut Edward III, 2 (buah) ciri utama struktur birokrasi ialah prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi.

1. Prosedur Operasi Standard (SOP). SOP telah dibangunkan sebagai tindak balas dalaman terhadap masa dan sumber daya pelaksana yang terbatas dan keinginan untuk keseragaman dalam kerja-kerja organisasi yang kompleks dan meluas. SOP yang dirancang secara rapi untuk situasi biasa pada masa lalu mungkin menghalang perubahan dalam dasar kerana mereka tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalang pelaksanaan dasar-dasar baru yang memerlukan cara baru bekerja atau jenis kakitangan baru untuk melaksanakan dasar. Lebih besar dasar memerlukan perubahan dalam cara rutin organisasi, semakin besar kemungkinan pelaksanaan SOP yang menghambat (Edward III, 1980).
2. Fragmentasi. Fragmentasi datang terutama dari tekanan di luar unit birokrasi, seperti jawatankuasa perundangan, kumpulan kepentingan, pegawai eksekutif, perlombagaan negara dan sifat dasar yang mempengaruhi organisasi birokrasi awam. Fragmentasi ialah penyebaran tanggungjawab ke arah bidang dasar di antara beberapa unit organisasi. "Fragmentasi ialah penyebaran tanggungjawab untuk kawasan dasar di antara beberapa unit organisasi." (Edward III, 1980). Lebih banyak pelakon

dan agensi yang terlibat dalam dasar tertentu dan lebih banyak saling berkaitan dengan keputusan mereka, kemungkinan kejayaan pelaksanaannya. Edward menyatakan bahawa pada umumnya, koordinasi yang lebih diperlukan untuk melaksanakan dasar, peluang kurang berjaya (Edward III, 1980)

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Bagi dasar awam yang akan dilaksanakan dengan berkesan, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apakah matlamat standard harus difahami oleh individu (pelaksana). Bertanggungjawab terhadap pencapaian piauan dan objektif dasar, oleh itu standard dan objektif perlu disampaikan kepada pelaksana. Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan tentang apa standar dan objektif harus konsisten dan seragam (konsistensi dan keseragaman) dari berbagai sumber informasi. Sekiranya tidak ada kejelasan dan keseragaman dan keseragaman terhadap matlamat standard dan dasar, maka apa yang menjadi matlamat standard dan dasar sukar dicapai. Dengan kejelasan ini, pelaksana polisi dapat mengetahui apa yang diharapkan daripada mereka dan mengetahui apa yang perlu dilakukan. Dalam organisasi awam, misalnya kerajaan tempatan, komunikasi sering merupakan proses yang sukar dan rumit. Proses memindahkan berita ke dalam organisasi atau dari satu organisasi ke organisasi yang lain, dan kepada komunikator lain, sering mengalami gangguan, sama ada disengajakan atau tidak. Sekiranya sumber komunikasi yang berbeza memberikan tafsiran yang tidak sama rata tentang maksud dan tujuan, atau sumber maklumat yang sama

memberikan tafsiran yang saling bertentangan, maka pelaksana dasar suatu hari akan mencari peristiwa yang lebih sulit untuk dilaksanakan dalam suatu kebijakan intensif.

Oleh itu, prospek pelaksanaan dasar yang berkesan sebahagian besarnya ditentukan oleh komunikasi yang tepat dan konsisten dengan pelaksana dasar (ketepatan dan konsistensi) (Van Mater dan Varn Horn, di Widodo 1974). Di samping itu, koordinasi ialah mekanisme yang kuat dalam pelaksanaan dasar. Lebih baik penyelarasan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dasar, semakin kecil kesalahan, dan sebaliknya.

e. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn di Augustine (2006): "sikap penerimaan atau penolakan ejen yang melaksanakan dasar itu sangat mempengaruhi kejayaan atau kegagalan pelaksanaan dasar awam. Ini sangat mungkin kerana dasar yang dilaksanakan bukanlah hasil daripada perumusan penduduk setempat yang menyedari masalah dan masalah yang mereka rasakan. Tetapi dasar awam biasanya turun ke bawah yang sangat mungkin pembuat keputusan tidak tahu walaupun tidak dapat menyentuh keperluan, keinginan atau masalah yang mesti diselesaikan.

Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang dasar dan bagaimana melihat pengaruh dasar itu mengenai kepentingan organisasi dan kepentingan peribadi mereka. Van Mater dan Van Horn (1974) menerangkan pelupusan bahawa pelaksanaan dasar bermula dengan penapisan pertama melalui persepsi pelaksana dalam sempadan yang mana polisi dilaksanakan.

Terdapat tiga jenis unsur tindak balas yang boleh mempengaruhi keupayaan dan kesediaan untuk melaksanakan dasar, termasuk pengetahuan pertama (kognisi), pemahaman dan pemahaman (pemahaman dan pemahaman) dasar, kedua, arahan tindak balas mereka sama ada untuk menerima, netral atau menolak (penerimaan, berkecuali dan penolakan), dan ketiga, keamatan dasar. Memahami tujuan umum objektif standard dan dasar ialah penting. Kerana, bagaimanapun pelaksanaan kebijakan yang berjaya, dapat dikecewakan ketika para pejabat (pegawai), tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan tersebut. Arah pelupusan pelaksana (pelaksana) piawaian dan objektif dasar. Arah pelupusan pelaksana (pelaksana) terhadap piawaian dan objektif dasar juga merupakan "perkara penting". Pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan dasar, kerana mereka menolak apa tujuan dasar (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan meluas dan mendalam terhadap piawaian dan objektif dasar di antara mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakan dasar itu, ialah potensi besar untuk pelaksanaan dasar yang berjaya (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, keupayaan pelupusan pelaksana (pelaksana) dapat mempengaruhi pelaksana (prestasi) dasar tersebut. Kekurangan atau keamatan terhad dalam pelupusan ini, akan menyebabkan kegagalan pelaksanaan dasar.

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Perkara terakhir yang perlu dipertimbangkan dalam menilai pelaksanaan pelaksanaan dasar ialah sejauh mana persekitaran luaran menyumbang kepada

kejayaan dasar awam. Persekutaran sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif boleh menjadi punca masalah daripada kegagalan pelaksanaan pelaksanaan dasar. Oleh itu, usaha untuk melaksanakan dasar memerlukan keadaan persekitaran luaran yang kondusif.

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2006: 149) mengatakan untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan terdapat empat variabel, iaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan kejayaan mencapai objektif pelaksanaan dasar awam. Pelaksanaan yang berkesan berlaku apabila pembuat keputusan sudah tahu apa yang mereka lakukan. Pengetahuan tentang apa yang mereka lakukan dapat berjalan jika komunikasi berjalan lancar, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan pelaksanaan harus disampaikan (dikomunikasikan).

2. Sumber

Begitulah kepatuhan pelaksana aturan dan peraturan kerajaan yang telah ditetapkan. Pelaksana mesti tahu sama ada orang lain yang terlibat dalam melaksanakan dasar mematuhi undang-undang. Dalam konteks lain, apabila terdapat kuasa rasmi, sering kali salah melihat keberkesanan kuasa dan kemudahan fizikal serta faktor penting dalam pelaksanaan dasar.

3. Pelupusan

Pelupusan atau sikap pelaksana polisi ialah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan dasar awam. Sekiranya pelaksanaan

dasar ialah berkesan, maka pelaksana dasar bukan sahaja perlu tahu apa yang akan dilakukan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak ada pengertian.

4. Struktur birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan dasar tersedia, atau pelaksana dasar mengetahui apa yang perlu dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan dasar tersebut, kegiatan tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapat kelemahan dalam birokrasi. Dasar yang kompleks itu memerlukan kerjasama ramai orang, apabila struktur birokrasi tidak sesuai dengan dasar yang ada, maka ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghalang proses dasar. Birokrasi sebagai pelaksana dasar mesti dapat menyokong dasar yang telah diputuskan secara politik dengan menyelaras dengan baik.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy* (1980: 5).

1. *Content of Policy* menurut Grindle ialah :

a. *Interest Affected* kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Interest affected tandangan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahawa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. *Type of Benefits (tipc man foal)*

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahawa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini ialah bahawa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Program *Implementer* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus (lulukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. *Resources Committed (snmbet-sumbet: daya yang digunakan)*

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context of Policy* menurut Grindle ialah:

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.

- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhann dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan ialah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini ialah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menganggapi suatu kebijakan.

Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang

diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

5. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002: 132), "hasil sumber sendiri daerah ialah hasil yang diperoleh dari sektor pajak daerah, levi serantau, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan aset regional yang terpisah, dan hasil sumber sendiri regional yang sah".

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Imbalan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Perpajakan dan Non-Pajak Daerah.

Klasifikasi PAD paling terkini berdasarkan Permendagri No. 13/2006 terdiri daripada: Cukai lokal, levi serantau, hasil pengurusan serantau yang terpisah, dan hasil tempatan yang sah. Jenis-jenis cukai dan levi serantau ialah terperinci mengikut objek pendapatan mengikut undang-undang mengenai cukai serantau dan pungutan serantau.

Jenis keputusan pengurusan aset serantau yang dipisahkan dipecah mengikut objektif pendapatan yang merangkumi bahagian pulangan ke atas penyertaan ekuiti dalam syarikat milik negara / BUMD, bahagian pulangan ke atas penyertaan ekuiti dalam syarikat milik negara / BUMN, dan bahagian keuntungan dalam penyertaan ekuiti dalam syarikat milik persendirian atau kumpulan perniagaan komuniti.

Lain-lain jenis PAD perundangan disediakan untuk belanjawan pendapatan serantau yang tidak termasuk dalam cukai serantau, levi serantau dan keputusan pengelolaan aset serantau yang terpisah dipecah mengikut objek pendapatan yang merangkumi hasil menjual aset serantau yang tidak dipisahkan, perkhidmatan semasa, pendapatan faedah, pendapatan dari tuntutan ganti rugi bagi rantau, penerimaan komisen, potongan, atau bentuk lain hasil daripada penjualan dan / atau perolehan barang dan / atau perkhidmatan oleh rantau ini, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata wang asing, pendapatan denda untuk pekerjaan lewat, pendapatan denda cukai, yuran penalti pendapatan. Pendapatan daripada pelaksanaan atau cagaran, pendapatan daripada organisasi pendidikan dan latihan, pendapatan dari ansuran / ansuran jualan.

Menurut Halim (2004: 67), "PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, iaitu: pajak daerah, levi serantau, hasil perusahaan-perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan aset properti daerah yang dipisahkan, dll. PAD sah". Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Halim (2004: 67) sesuai dengan klasifikasi PAD berdasarkan Kepmendagri No. 29/2002.

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang keseimbangan kewangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan sumber sendiri daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari wilayah yang dikenakan berdasarkan peraturan regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ahmad Yani (2002: 56) juga menyebutkan bahawa hasil tempatan ialah pendapatan yang diterima dari rantau ini dari sumber-sumber di dalam

kawasannya sendiri yang dikenakan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini membandingkan dua penelitian yang telah dilakukan oleh:

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Afra Maya Sari (2016)	Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Wallet (Studi di Kecamatan Payung Sekaki).	Pada penelitian ini perbedaan yang terdapat dapat dilihat dari fenomena serta indikator dalam operasional variable.
2.	Raja Savika Rezki (2015)	Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 07 tahun 2006 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.	Pada penelitian ini perbedaan yang terdapat dapat dilihat dari fenomena serta indikator dalam operasional variable.
3.	Adrian (2016)	evaluasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang izin dan retribusi pengelolaan dan pengusahaan burung wallet di Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun.	Pada penelitian ini perbedaan yang terdapat dapat dilihat dari fenomena serta indikator dalam operasional variabel.

C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian “**Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti**” kemudian diukur

dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut:

Kerangka Pikiran Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber : Data Modifikasi Penelitian, 2020

D. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pada dasarnya ialah cara agar sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan, tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan public.
2. Efektivitas ialah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan.
3. Efisiensi ialah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.
4. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
5. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.
6. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.
7. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan empat indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel II.1 Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala
1	2	3	4	5
Kebijakan Publik (<i>Public Policy</i>) ialah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. (William N. Dunn, 2003:132)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	Konten	a. kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi b. tipe manfaat c. derajat perubahan yang ingin dicapai d. letak pengambilan keputusan e. pelaksana program f. sumber-sumber daya yang digunakan	Terimplementasi Cukup Terimplementasi Tidak Terimplementasi
		Konteks	a. kekuasaan kepentingan kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat b. karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa c. tingkat kepatuharn dan adanya respon dari pelaksana	Terimplementasi Cukup Terimplementasi Tidak Terimplementasi

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten

Kepulauan Meranti, maka dilakukan untuk pengukuran variable ialah sebagai berikut :

Terimplementasi : Apabila semua indikator variabel berada pada kategori terlaksana atau pada ukuran 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila hanya 2-3 dari indikator variabel berada pada kategori terlaksana dengan pengukuran 34-66%.

Kurang Terimplementasi : Apabila 0-1 dari indikator variabel berada pada kategori terlaksana atau dengan pengukuran 0-33%.

Adapun untuk indikator evaluasi teknik pengukurannya sebagai berikut :

1. Konten

Terimplementasi : Apabila semua item penilaian berada pada kategori terlaksana atau pada ukuran 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila hanya 2-3 dari item penilaian berada pada kategori terlaksana dengan pengukuran 34-66%.

Kurang Terimplementasi : Apabila 0-1 dari item penilaian berada pada kategori terlaksana atau dengan pengukuran 0-33%.

2. Konteks

Terimplementasi : Apabila semua item penilaian berada pada kategori terlaksana atau pada ukuran 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila hanya 2-3 dari item penilaian berada pada kategori terlaksana dengan pengukuran 34-66%.

Kurang Terimplementasi : Apabila 0-1 dari item penilaian berada pada kategori terlaksana atau dengan pengukuran 0-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini ialah :

A. Tipe Penelitian

Jenis deskriptif ialah jenis penyelidikan yang menggambarkan pembolehubah yang dikaji dalam kajian ini. Kemudian melalui pendekatan kuantitatif, iaitu menjawab dan menyelesaikan masalah dengan memahami dan memperdalam keseluruhan dan utuh objek yang sedang dipelajari untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

B. Lokasi Penelitian

Kajian ini mengambil lokasi Kepulauan Meranti, khususnya di Kantor Pelaburan dan Perkhidmatan Bersepadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Tebing Tinggi, Daerah Kepulauan Meranti. Dengan alasan agensi itu ialah tempat untuk menguruskan permit pengurusan dan perniagaan sarang burung walet kemudian mendapati masalah dalam pengurusan permit ini.

C. Populasi dan Sampel

Penduduk ialah koleksi objek atau elemen yang terkandung dalam kajian sebagai sasaran untuk memperoleh dan mengumpulkan data. Penduduk yang bersangkutan ialah semua pekerja Pejabat Pelesenan Pejabat Pelaburan dan Perkhidmatan Satu Hentikan Integrasi (DPMPTSP) Daerah Tebing Tinggi,

Kabupaten Kepulauan Meranti dan masyarakat yang dilayani oleh pihak berwenang dalam pengelolaan pengelolaan sarang burung walet.

Tabel III.1 Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah		%
		Populasi	Sampel	
1.	Kepala Dinas	1	1	100
2.	Kepala Bidang Perizinan	1	1	100
3.	Pegawai	17	2	10
4.	Pengusaha sarang burung walet Kecamatan Tebing Tinggi	529	20	5
Jumlah		548	24	10

Sumber : Data Penelitian, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik pensampelan yang digunakan dalam kajian ini, untuk pekerja Jabatan Perizinan Pelaburan dan Perkhidmatan Henti Bersepadu (DPMPTSP) Daerah Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan teknik sampling purposive, iaitu teknik sampling karena ada pertimbangan tertentu karena tugasnya ialah menelan perkiraan permit perniagaan, sementara bagi usahawan sarang burung walet menggunakan teknik sampling purposive, yang mengambil responden sebagai sampel berdasarkan pertemuan peluang dengan para penyelidik dapat digunakan sebagai sampel jika orang yang bertemu dipenuhi sesuai dengan sumber data dengan kriteria utamanya.

E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian iaitu :

a. Data Primer ialah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan :

1. Identitas responden
2. Hasil tanggapan mengenai indikator kebijakan pemerintah daerah terhadap perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti

b. Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Meranti dan melalui riset kepustakaan meliputi :

1. Gambaran umum Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Jumlah pegawai
3. Tingkat pendidikan pegawai

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Temuduga

Wawancara ialah pengumpulan data dengan meminta beberapa soalan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Temubual ialah satu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin

mendapatkan maklumat daripada orang lain dengan bertanya soalan berdasarkan objektif tertentu (Deddy, 2004: 180).

b. Pemerhatian

Pemerhatian ialah cara mengumpul data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara penyelidik dan pemberi maklumat dalam penentuan penyelidikan (pemerhatian objek kajian di lapangan). Pemerhatian dibuat dengan memerhati dan merekodkan semua peristiwa. Kaedah ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta dalam bidang ini (Moleong, 2010: 125-126). Pemerhatian dibuat pada permulaan kajian untuk menentukan permasalahan yang timbul berkaitan dengan kajian ini.

c. Soal selidik

Soal selidik ialah teknik pengumpulan data melalui borang yang mengandungi soalan yang ditulis secara bertulis kepada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawapan atau maklum balas dan maklumat yang diperlukan oleh penyelidik (Mardalis: 2008: 66). Prosedur pengedaran borang soal selidik dijalankan secara langsung dengan memenuhi responden.

d. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung ditujukan kepada subjek penyelidikan, tetapi sebagai data sokongan yang diperlukan oleh penyelidik (Deddy, 2004: 195). Dalam kes ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen atau arkib dari institusi yang dipersoalkan. Dokumentasi berkaitan ialah gambar hasil penyelidikan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah kumpulan, membuat turutan, memanipulasi, dan menyingkirkan data supaya mudah dibaca. Dalam menganalisis data, data dokumentasi disambungkan dan diselesaikan dengan data temu bual dan soal selidik.

Berdasarkan pemahaman di atas penulis membuat kompilasi data dengan mengklasifikasikan data kemudian menganalisis data dan membandingkan data lain yang berkaitan dengan deskriptif dengan pendekatan induktif. Ini ialah untuk mendapatkan data yang perlu yang empirikal supaya kemudian dapat mempertajam analisis penulis yang dipandu oleh hasil wawancara langsung yang digabungkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan objek penyelidikan. Analisis data yang digunakan ialah melalui pendekatan kuantitatif, iaitu menjawab dan menyelesaikan masalah dengan memahami dan memperdalam keseluruhan dan utuh objek yang di bawah kajian untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2. Jadwal waktu penelitian tentang implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2018-2019																								Ket	
		Desember				Agustus				November				Desember				Januari				Februari					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																				
2	Seminar UP							x	x	x	x																
3	Perbaikan UP											x	x														
4	Perbaikan daftar kusioner												x														
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)												x	x													
6	Penelitian Lapangan												x														
7	Penelitian dan analisis data												x	x													
8	Penyusunan laporan Peneltian (Skripsi)												x														
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi												x	x													
10	Ujian Skripsi												x														
11	Refisi dan Pengesahan skripsi												x	x													
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi												x														

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibukota Selatpanjang. Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pengembangan Kabupaten Bengkalis, yang dibentuk pada 19 Desember 2008. Dasar hukum untuk penubuhan Kabupaten Kepulauan Meranti ialah UU nomor 12 tahun 2009, bertanggal 16 Januari 2009.

Permintaan pembahagian daerah Kepulauan Meranti telah diperjuangkan oleh rakyat Meranti sejak 1957. Panggilan untuk pemekaran dibacakan oleh masyarakat pada tahun 1970-an dan 1990-an hingga 2008, yang merupakan satu-satunya penjara di Riau yang belum dibahagikan pada masa itu, dengan perjuangan berterusan sejumlah tokoh-tokoh terkemuka Masyarakat Meranti pada 25 Julai 2005 Perjuangan Perjuangan Kabupaten Meranti terbentuk (BP2KM) sebagai forum bagi aspirasi masyarakat Meranti untuk berpisah dari daerah Bengkalis.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, maka dinyatakan dalam Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 / KPTS / P / DPRD / 1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Kelulusan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, Bupati Nomor Bupati Nomor 135 / TP / 876 tanggal 17 Jun 1999, Mengenai dukungan pembentukan Kabupaten Meranti Kepulauan, Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Riau

Nomor 16 / KPTS / DPRD / 2008 bertanggal 11 Juli 2008, Gubernur Provinsi Riau Nomor 100 / PH / 21.16.a bertanggal 9 Juni 2008 Mengenai Dukungan Penandatanganan Kabupaten Kepulauan Meranti, Gubernur Provinsi Riau Surat Nomor 100 / PH / 58.24 bertanggal 8 September 2008 tentang Rekomendasi Penandatanganan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396 / IX / 2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau tentang Pembentukan Daerah Kepulauan Meranti dan Keputusan Provinsi Provinsi Riau Nomor 100 / PH / 58,32 tanggal 18 Desember 2008 mengenai Kelulusan Pemerintah Provinsi Riau tentang Pembentukan Daerah Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hal ini, Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan menyeluruh tentang kesesuaian pembentukan serantau dan menyimpulkan bahawa pada 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan mendirikan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

Selatpanjang City ialah pusat pentadbiran Kepulauan Meranti, duhulu ialah salah satu kota paling sibuk dan paling terkenal di kota Kesultanan Siak. Bandar ini telah membentuk komuniti heterogen, terutamanya orang Melayu dan Cina, kerana peranan interfaith mereka terbentuk rapat dalam harmoni dalam kegiatan budaya dan perdagangan. Semua ini tidak boleh dipisahkan dari persaudaraan antara persaudaraan. Faktor-faktor ini kemudian membawa perubahan perdagangan dan lalu lintas barang dan orang dari China ke nusantara dan sebaliknya.

Secara geografi, daerah Kepulauan Meranti terletak di koordinat antara $0^{\circ} 42' 30''$ - $1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0''$ - $103^{\circ} 10' 0''$ Timur, dan terletak di pantai timur Sumatra, dengan garis pantai yang bersempadan dengan beberapa negara jiran dan termasuk dalam Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triangle) Indonesia - Malaysia - Singapura (IMS-GT) dan secara tidak langsung menjadi kawasan Hinterland Zon Perdagangan Bebas (FTZ) Batam - Tj. Karimun Hall.

Untuk memanfaatkan peluang dan kelebihan kedudukan geografi dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi di rantau sempadan dengan negara-negara jiran Malaysia dan Singapura, Kepulauan Meranti mempunyai potensi untuk berfungsi sebagai Gerbang Luar Negara / Antarabangsa yang menghubungkan dengan tanah besar Riau dengan negara-negara jiran di laut, ini ialah untuk melengkapkan kota Dumai yang pertama kali ditubuhkan dan berfungsi sebagai Pusat Aktiviti Strategik Negara yang berfungsi sebagai teras depan negara, pintu masuk, perdagangan dan industri antarabangsa. Kawasan Kepulauan Meranti: 3707.84 km^2 , manakala kawasan Selatpanjang ialah 45.44 km^2 . Batas Kabupaten Kepulauan Meranti ialah:

Utara	Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis
Selatan	Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
Barat	Kabupaten Bengkalis
Timur	Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 kecamatan dan 98 desa/kelurahan, iaitu:

Tabel 4.1. Luas Kecamatan serta Jumlah Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Kecamatan (km ²)	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (2007) (jiwa)
1	Tebing Tinggi	Selatpanjang	45,44	9	76.763
2	Tebing Tinggi Barat	Alai	586,83	12	15.126
3	Rangsang	Tanjung Samak	681,00	14	28.106
4	Rangsang Barat	Bantar	241,60	16	29.770
5	Merbau	Teluk Belitung	1.348,91	14	47.370
6	Pulau Merbau	Renak Rungun		7	
7	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	804,06	7	
8	Putri Puyu	Bandul	847,540	10	17.966
9	Rangsang Pesisir	Sonde		10	

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Tingkat pertumbuhan penduduk sebagai Kabupaten termuda di Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti, selama sepuluh tahun terakhir iaitu dari 2010 hingga 2018 ialah sekitar 0,60 persen. Berdasarkan hasil banci penduduk (SP) Badan Pusat Statistik Bengkalis (BPS), yang hidup pada tahun 2010 berjumlah sekitar 166,1 ribu jiwa dan pada tahun 2018 jumlah penduduk meningkat sekitar 176,4 ribu orang, yang terdiri dari 90.577 laki-laki dan 85,794 wanita. Kadar pertumbuhan penduduk tertinggi di daerah termuda ini ialah di Daerah Tebing Tinggi Barat dengan angka sekitar 1.58 peratus atau dari 13.0 ribu penduduk SP pada tahun 2010 kepada 15.2 ribu pada tahun 2018 SP tahun ini.

Walaupun yang paling rendah ialah di Daerah Rangsang Barat, sekitar 0.12 peratus atau keputusan SP pada tahun 2010 berjumlah 24.6 ribu orang kepada 24.9 ribu orang di SP 2018. Kadar pertumbuhan penduduk di Daerah Tebing Tinggi (Daerah Tebing Tinggi Timur) 0 , 56 peratus atau dari jumlah penduduk SP pada tahun 2000 berjumlah 62.2 ribu orang kepada 65.8 ribu orang di SP pada 2018, di Kecamatan Rangsang kadar pertumbuhan penduduk sekitar 0.87 peratus daripada jumlah penduduk di SP pada tahun 2010 berjumlah 24.2 seribu penduduk kepada 26.4 ribu orang di SP 2018 tahun ini, dan di Daerah Merbau (Daerah Pulau Merbau) kadar pertumbuhan penduduk ialah sekitar 0.47 peratus atau dari jumlah penduduk 42.1 ribu orang pada SP 2010 hingga 44, 1 ribu penduduk di SP 2018.

Sebanyak 23.48 Peratus Penduduk Tidak Tetap Berdasarkan hasil banci penduduk (SP) BPS Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018, jumlah penduduk yang tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti seluas 3,760,13 kilometer persegi, kepadatan penduduk rata-rata ialah 47 orang per Kilometer persegi. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, iaitu Kabupaten Rangsang Barat, ialah 97 jiwa per kilometer persegi, diikuti oleh kecamatan Tebing Tinggi sekitar 66 orang per kilometer persegi.

Walaupun kepadatan penduduk terendah ialah Daerah Tebing Tinggi Barat, iaitu 31 penduduk setiap kilometer persegi. Sementara itu, berbanding dengan pengumpulan data yang didaftarkan melalui pendaftaran awam tempatan yang berjumlah kira-kira 230 ribu penduduk dan pengumpulan data melalui SP BPS pada 2018 penduduk Kepulauan Meranti, hanya terdapat 175 ribu penduduk

di kawasan itu. Boleh dikatakan, sekurang-kurangnya kira-kira 23 peratus penduduk yang didaftarkan di Kepulauan Meranti tidak dapat diselesaikan.

Dari data terdapat perbezaan besar dari 230 ribu orang menjadi 175 orang, susut nilai ialah kerana penduduk yang tidak berdaftar dengan capil setempat tidak menetap di sana. Mungkin kerana belajar dan bekerja di luar kawasan ini dan warganegara ini masih disenaraikan dalam capilduk. Bilangan Penduduk mengikut Kabupaten dan Hasil Gender Banci Penduduk (dalam ribuan), iaitu:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	Kecamatan	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah
1	Tebing Tinggi	28.643	27.551	56.194
2	Tebing Tinggi barat	8.448	7.534	15.982
3	Tebing Tinggi Timur	6.223	5.608	11.831
4	Rangsang	14.239	13.117	27.356
5	Rangsang Barat	12.971	12.745	25.716
6	Merbau	15.724	14.845	30.569
7	Pulau Merbau	7.594	7.421	15.014
Jumlah Total		93.842	88.821	182.662

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti terus mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan data terakhir Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Meranti hingga Februari 2012 meningkat menjadi 238.412 ribu jiwa.

B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Aparatur Daerah Kepulauan Meranti, Kantor Pelayanan Investasi Terintegrasi Pintu dan Tenaga Tunggal

(DPMPTSPTK) dibentuk dalam Peraturan Nomor Perairan Kepulauan Meranti 36 tahun 2016 mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi utama, serta prosedur kerja perkhidmatan pelaburan, perkhidmatan bersepadu sehenti dan tenaga kerja kepulauan Meranti.

Tugasnya:

Membantu Bupati dalam melaksanakan Hal-hal Pemerintahan yang merupakan tugas dan tugas pemerintah daerah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Meranti dalam bidang Investasi, Layanan dan Buruh Terpadu. Tugas utama Pejabat Pelaburan Modal Perkhidmatan Henti dan Tenaga Kerja Satu ialah merancang, membangunkan iklim dan promosi pelaburan, memantau, menjalankan pembinaan, dan menjalankan pelaburan.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menmpunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan dan pengolahan data dan informasi.
2. Pelaksanaan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas.
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

- Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kepulauan Meranti:
- a. kepala;
 - b. sekretariat terdiri dari:
 1. sub bagian umum, kepegawaian dan program;
 2. sub bagian keuangan dan perlengkapan.
 - c. bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, terdiri dari:
 1. seksi perencanaan penanaman modal;
 2. seksi pengembangan iklim penanaman modal; dan
 3. seksi promosi penanaman modal.
 - d. bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi:
 1. seksi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 2. seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
 3. seksi pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal.
 - e. bidang penyelenggaraan pelayaan perizinan dan nonperizinan , terdiri dari:
 1. seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
 2. seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan II; dan
 3. seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan III.
 - f. bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan, terdiri dari:
 1. seksi pengaduan dan informasi layanan;
 2. seksi kebijakan dan penyuluhan layanan; dan
 3. seksi pelaporan dan peningkatan layanan.

f. bidang tenagakerja, terdiri dari:

1. seksi 1;
 2. seksi 2; dan
 3. seksi 3.
- g. kelompok jabatan fungsional; dan
- h. unit pelaksana teknis dinas.

C. Visi & Misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

1. Visi

Terwujudnya investasi dan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah dan transparan.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan secara cepat, tepat, mudah dan transparan
- c. Menciptakan peluang dan potensi investasi daerah menjadi potensi unggulan berdasarkan sumber daya lokal yang ramah lingkungan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan dan non perizinan
- e. Meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif serta menciptakan lapangan kerja

D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Tugas:

dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kabupaten kepulauan meranti mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja mempunyai fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan , promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan dan pengolahan data informasi.
2. Pelaksanaan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

E. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti iaitu Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja ialah:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten pada bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

2. Seketaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang, perumusan, Umum, Kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi Keuangan dan Perlengkapan. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja
- b. Menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi umum, kepegawaian, program, keuangan dan perlengkapan
- d. Melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana

- e. Melaksanaan pengkoordinasian peyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bagian Umum dan kepegawaian meliputi penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat dan melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam menghimpun dan menyiapkan bahan perencanaan, program, kebijakan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Program terdiri dari:
 - a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
 - b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian

- c) Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian
- d) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah
- e) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian
- f) Melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya
- g) Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), RENSTRA serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- h) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program dan tata usaha
- i) Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya

- j) Meneliti usulan permintaan formasi pegawai dilingkungan dinas, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas
- k) Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas
- l) Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor
- m) Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan
- n) Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat
- o) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya
- p) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan
- q) Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas
- r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan di bagian keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari:

- a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c) Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e) Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;

- f) Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- g) Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
- h) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- i) Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
- j) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
- k) Mengatur perlengkapan kantor, penataaan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP;
- l) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- m) Membuat laporan hasil pelaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan

n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, mengkaji, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengembangkan, fasilitasi pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana kerja bidang;
- b. Penyusunan data dan potensi peluang penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- c. Pengelolaan dan kerja sama penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup

daerah serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal dengan instansi terkait; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

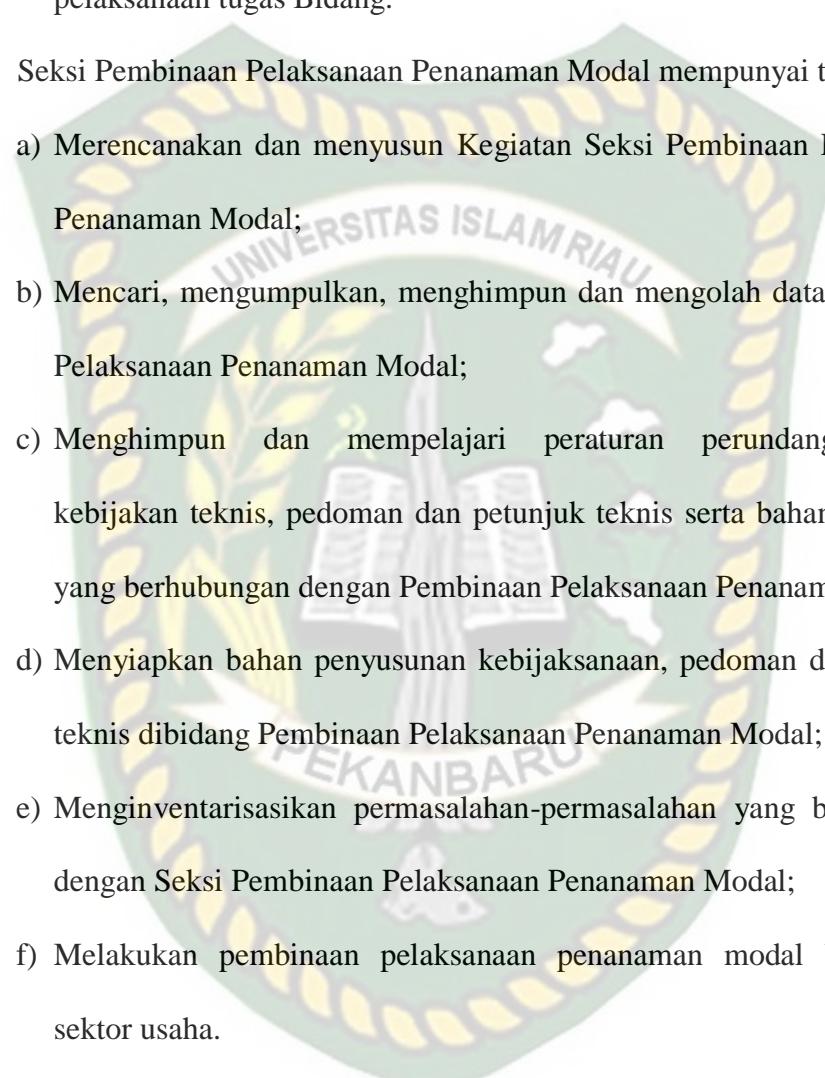
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Dalam menyelenggarakan fungsinya:

- a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal
- c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal dan
- d. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:

- 1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a) Merencanakan dan menyusun Kegiatan seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- d) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- e) Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- f) Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
- g) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- h) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan dan

- 
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang.
 - 2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - a) Merencanakan dan menyusun Kegiatan Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - e) Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f) Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha.
 - g) Fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah.
 - h) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan

- 
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang.
 - 3) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - a) Merencanakan dan menyusun Kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - b) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data Sistem Informasi Penanaman Modal
 - c) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - d) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - e) Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - f) Mengolah dan menyiapkan data pelaporan perizinan dan nonperizinan penanaman modal
 - g) Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang.

5. Bidang Penyelenggaraan Pelayaan Perizinan dan Nonperizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayaan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di bidang Penyelenggaraan Pelayaan Perizinan dan Nonperizinan, pada urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, kesehatan, Pendidikan, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Sosial dan Tenaga kerja, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Pariwisata, Perhubungan, Lingkungan hidup, Koperasi usaha kecil dan menengah, Kebudayaan, Kelautan dan perikanan, Penanaman Modal. Dalam menyelenggarakan fungsinya:

- a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan I;
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan II;
- c. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi,

memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan III; dan

- d. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Susunan Organisasi Bidang Penyelenggaraan Pelayaan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari:

- 1) Seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan I.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai tugas: Merencanakan, Melaksanakan, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengevaluasi dan menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi usaha kecil dan menengah dan pertanian. Uraian tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I ialah:

- a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan

- f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan dan
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Penyelenggaraan Pelayaan Perizinan dan Nonperizinan.
- 2) Seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan II.
- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai tugas: Merencanakan, Melaksanakan, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengevaluasi dan menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Pendidikan, Perumahan dan kawasan permukiman, Pariwisata, Perhubungan, Kebudayaan, dan

perikanan. Uraian tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II ialah:

- a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan dan
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Penyelenggaraan Pelayaan Perizinan dan Nonperizinan.

3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengevaluasi dan menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kesehatan, sosial dan tenaga kerja. Uraian tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III ialah:

- a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan

- k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
 - l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan dan
 - m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
- Penyelenggaraan Pelayaan Perizinan dan Nonperizinan

6. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengimplifikasi, mungkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan

kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; dan

- c. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.

Susunan Organisasi Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:

- 1) seksi pengaduan dan informasi layanan;
- 2) seksi kebijakan dan penyuluhan layanan; dan
- 3) seksi pelaporan dan peningkatan layanan.

7. Bidang Tenaga Kerja

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Penempatan Pelatihan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja serta Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Bidang Tenaga Kerja dalam

menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
- b. verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- e. koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- f. koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota;
- g. koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
- h. koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- i. koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- j. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- k. verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- l. promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- m. koordinasi pendaftaran, perekutan dan seleksi calon TKI;

- n. koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;
- o. koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- p. koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- q. koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- r. pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;
- s. verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/ kota;
- t. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten kota;
- u. koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten / kota;
- v. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- w. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan; dan
- x. koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Susunan Organisasi tenaga kerja, terdiri dari:

- 1) Seksi 1;
- 2) Seksi 2; dan
- 3) Seksi 3.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPTD). UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Peringkat awal perbincangan perbincangan dalam Bab V, penulis merasa perlu untuk menjelaskan identitas responden. Oleh itu, ia boleh menjelaskan objektif dan kesahihan maklumat penyelidikan yang disediakan oleh responden. Identiti responden yang akan dibincangkan dalam kajian ini ialah:

1. Umur Responden

Umur ialah faktor yang sangat berpengaruh dalam seseorang dalam menjalankan semua tugas yang diberikan, selain usia itu juga boleh mempengaruhi produktiviti kerja. Orang yang lebih tua akan mempengaruhi produktiviti kerja, tahap ketepatan dalam kerja, kepekaan dan ketahanan fizikal di tempat kerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesihatan, ketahanan dan lain-lain. Tahap umur responden di Pejabat Pelaburan dan Satu Hentikan Perkhidmatan Bersepadu (DPMPTSP) Daerah Tebing Tinggi, Daerah Kepulauan Meranti yang menjadi responden dalam kajian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 20 tahun	-	-
2.	21-30 tahun	4	20
3.	31-40 tahun	13	65
4.	> 41 tahun	3	15
Jumlah		20	100

Sumber : Data Olahan. 2020

Berdasarkan jadual V.1, dapat dilihat bahawa mayoritas umur responden ialah pada usia 31-40 tahun yang sebanyak 13 orang atau 65%. Umur ialah faktor yang sangat berpengaruh dalam seseorang dalam menjalankan semua tugas yang diberikan, selain usia itu juga boleh mempengaruhi produktiviti kerja. Orang yang lebih tua akan mempengaruhi produktiviti kerja, tahap ketepatan dalam kerja, kepekatan dan ketahanan fizikal di tempat kerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesihatan, ketahanan dan lain-lain.

2. Jenis Kelamin

Berikut ini diuraikan mengenai responden pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan jenis kelamin.

Tabel V.2 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	14	70
2.	Perempuan	6	30
	Jumlah	20	100

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan Jadual V.2, dapat dilihat bahawa bilangan responden lelaki ialah 14 orang atau 70%. Manakala responden perempuan ialah 6 atau 30%. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden ialah lelaki. Selain daripada umur, jantina juga boleh mempengaruhi kerja yang diberikan. Secara umum, kerja lelaki ialah lebih berat daripada kerja wanita. Tetapi sesetengah syarikat atau agensi menggunakan orang yang tidak dilihat dari seks tetapi lebih daripada kemampuan dan pendidikan pekerja.

B. Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi pulau sebagai jalur perdagangan dan sarana transportasi laut yang besar. Potensi ini menjadikan salah satu hasil Pendapatan Asal Serantau (PAD) dalam sektor levi pelabuhan. Bagi sumber kewangan serantau sebagai pendapatan dalam pelaksanaan desentralisasi, salah satunya ialah kemampuan rantau untuk mengurus Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014, bahawa pelaksanaan otonomi serantau yang luas dan utuh diletakkan di kabupaten

dan kota, Pendapatan Asli Serantau Kepulauan Meranti menjadi sangat penting dalam mendukung Keuangan Daerah.

Atas sebab ini, ialah perlu bagi pemerintah Kepulauan Meranti di Kepulauan Meranti melalui Pengurusan Daerah dan Pengurusan Aset Wilayah Meranti untuk melakukan berbagai upaya untuk menjelajahi potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan rantau. Satu sumber Pendapatan Daerah Daerah Kepulauan Meranti yang harus dipertimbangkan untuk manajemen ialah dari sektor Pajak Daerah.

Pengurusan dan eksplorasi sarang menelan menjadi salah satu faktor yang berpotensi untuk memajukan ekonomi serantau dan membuka peluang pekerjaan untuk komuniti, tetapi mempunyai banyak alasan pembiakan menelan tidak menjamin mereka dapat memberikan masukan yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam sektor produk pertanian di Kepulauan Meranti Kepulauan. kerana banyak jenis sarang menelan yang tidak mempunyai lesen perniagaan sarang menelan, sementara bangunan perniagaan sarang burung walet di Kabupaten Meranti mengambil banyak masa.

Kesan negatif yang disebabkan oleh perniagaan burung menelan cukup banyak, sehingga dapat mengganggu kenyamanan penduduk dan juga dapat membawa penyakit. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti mengatur eksplorasi sarang menelan melalui bentuk Peraturan Pemerintah Kabupaten Meranti No. 118 dari 2018 mengenai prosedur dan petunjuk untuk pelaksanaan izin pengelolaan dan pengawasan pengelolaan sarang dan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No. 36 tahun 2016 tentang kedudukan, struktur

organisasi, tugas dan fungsi utama dan prosedur kerja Kantor Penanaman Modal, Layanan Pimpinan Terpadu dan Pekerja Daerah Kepulauan Meranti.

Permit Pengurusan dan Eksplotasi Sarang Swallow yang dikeluarkan oleh Kerajaan Kepulauan Meranti Kepulauan ialah untuk mengawal usahawan burung menelan agar dapat mewujudkan regulasi pemilik administrasi dan bisnis regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Meranti.

1. Konten

Konten menurut Grindle ialah :

- a. *Interest Affected* kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Interest affected tandangan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahawa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- b. *Type of Benefits (tipc man foal)*

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahawa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini ialah bahawa seberapa besar

perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Program *Implementer* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus (lulukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. *Resources Committed* (*snmbet-sumbet*: daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Sekiranya selepas pelaksanaan aktiviti dasar awam impak tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dapat dikatakan bahawa suatu kegiatan kebijakan telah gagal, namun kadang-kadang hasil kebijakan publik tidak segera efektif dalam jangka pendek, tetapi setelah melalui proses tertentu. Dari segi memahami keefektifan perniagaan, dapat ditafsirkan bahawa keberkesanan ialah sejauh mana ia dapat mencapai tujuannya pada waktu yang tepat dalam menjalankan tugas utama, kualitas produk yang dihasilkan dan pembangunan. Untuk dapat melihat keputusan respon responden mengenai

penunjuk kandungan dalam Pelaksanaan Dasar-dasar Kerajaan Tempatan Terhadap Pelesenan Pengurusan dan Perniagaan Sarang Swallow di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dapat dilihat pada jadual berikut:

Tabel V.3. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Indikator konten dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1.	kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi	5 (25%)	12 (60%)	3 (15%)	20 (100%)
2.	tipe manfaat	7 (35%)	8 (40%)	5 (25%)	20 (100%)
3.	derajat perubahan yang ingin dicapai	6 (30%)	11 (55%)	3 (15%)	20 (100%)
4.	letak pengambilan keputusan	9 (45%)	5 (25%)	6 (30%)	20 (100%)
5.	pelaksana program	9 (45%)	6 (30%)	5 (25%)	20 (100%)
6.	sumber-sumber daya yang digunakan	8 (40%)	9 (45%)	3 (15%)	20 (100%)
Jumlah		44	51	25	120
Rata-rata		7	8	5	20
Persentase		32%	40%	25%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2020

Dari hasil tindak balas di atas mengenai kandungan Pelaksanaan Polisi Tempatan Terhadap Pelesenan Pengurusan dan Perniagaan Sarang Swallow di Kabupaten Kepulauan Meranti, diketahui bahawa sebagian besar tanggapan responden menyatakan bahawa itu cukup dilaksanakan dengan tingkat respon sebesar 40%. Ini bermakna bahawa tidak semua responden menyedari pentingnya pelesenan, terutamanya untuk perniagaan dompet ini, ini juga didorong oleh

kesukaran mekanisme pelesenan yang dilakukan supaya responden enggan membuat perkiraan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Sutardi pada tanggal 08 Januari 2020, diketahui bahawa :

“kami dari pihat Dinas Kehutan dan Perkebunan sebelum mengeluarkan surat rekomendasi akan melakukan pemeriksaan terhadap lokasi penangkarang sarang burung walet, pertimbangan teknis ini dilakukan agar lokasi usaha sarang burung walet harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan dampak negatif. Hal ini kami laksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku, maka dari itu kami harus sangat memahami apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami”.

Sedangkan wawancara dengan Pegawai Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Zambrizal pada tanggal 09 Januari 2020, diketahui bahawa :

“pengusaha sarang burung walet yang ingin membuat izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet haruslah mendaftar terlebih dahulu ke pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku tersebut. Memang sulit persyaratan dan mekanismenya tapi memang ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Sosialisasi Peraturan Daerah pada tingkat pelaksana atau pelaksana telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Meranti. Walaupun sosialisasi kepada golongan sasaran atau rakyat Kepulauan Meranti, terutama para pelaku petani menelan di Kepulauan Meranti dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Pegawai Pelesenan Kantor Pelayanan Investasi dan Satu Pimpinan Terpadu

(DPMPTSP), Kabupaten Tebing Tinggi, Kabupaten Meranti, Kepulauan Meranti, Yudirman Pada 9 Januari 2020, diketahui bahawa:

“kami di dinas melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengadakan seminar, dan dihadiri oleh para asosiasi pengusaha sarang burung walet. Untuk Peraturan Daerah ini tidak ada kegiatan sosialisasi secara khusus, cuma diikutkan saja kalau kami turun lapangan untuk melakukan pengawasan juga disampaikan sama masyarakat bilang ada Peraturan Daerah begini”

Dari pemerhatian penyelidik, diketahui bahawa masih terdapat banyak usahawan menelan yang belum mengurus lesen mereka, mengutip kesulitan pentadbiran dan mekanisme yang perlu dilakukan sehingga mereka dinilai rumit. Kemudian program sosialisasi yang dijalankan oleh jabatan yang berkaitan tidak efektif sehingga tidak dapat memberi dampak pada kesadaran pengusaha menelan.

2. Konteks

Konteks menurut Grindle ialah :

- Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implemtasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.

- Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan di mana sutau kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuharn dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan ialah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini ialah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menganggapi suatu kebijakan.

Sumber mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan dasar, namun jelas dan konsisten ketentuan atau aturan dari suatu kebijakan. Peluang atau sikap ialah tingkah laku yang ditunjukkan oleh unsur-unsur aktiviti pelaksanaan dasar untuk dapat menyelaraskan pertumbuhan tingkah laku sikap yang ditunjukkan oleh pemaju polisi kerajaan mengenai subjek dan objek dasar. Untuk dapat melihat keputusan respon responden mengenai petunjuk konteks dalam Pelaksanaan Dasar-dasar Kerajaan Serantau terhadap Pengurusan Perijinan dan Sarang Swallow di Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.4. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Indikator konteks dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1.	kekuasaan kepentingan kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat	6 (30%)	10 (50%)	4 (20%)	20 (100%)
2.	karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa	10 (50%)	7 (35%)	3 (15%)	20 (100%)
3.	tingkat kepatuharn dan adanya respon dari pelaksana	7 (35%)	9 (45%)	4 (20%)	20 (100%)
Jumlah		23	26	11	60
Rata-rata		8	8	4	20
Persentase		40%	40%	20%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2020

Dari hasil tindak balas di atas mengenai konteks Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tempatan Terhadap Perizinan Manajemen dan Usaha Sarang Swallow di Kabupaten Kepulauan Meranti, diketahui bahawa sebagian besar tanggapan responden menyatakan bahawa hal itu cukup dilaksanakan dengan tingkat respon sebesar 40%. Ini bermakna peraturan yang berkaitan dengan pelesenan dompet ini masih tidak berkesan kerana tiada sekatan yang tegas dikenakan ke atas usahawan sehingga kini.

Hasil wawancara dengan Kepala Perizinan untuk Kantor Penanaman Modal dan Pimpinan Terpadu (DPMPTSP) Kabupaten Tebing Tinggi, Kabupaten Meranti Kepulauan, Kabupaten Meranti Islands, Bapak Sutardi pada tanggal 8 Januari 2020, diketahui bahawa:

“staff yang kami miliki dalam melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ini sudah memadai dan sudah menjalankan tugas yang diberikan pimpinan, baik itu yang berada dikantor maupun yang bertugas langsung kelapangan untuk mengecek lokasi, hanya saja jumlah pengawas tidak sebanding dengan jumlah tempat usaha sarang burung walet”.

Sedangkan wawancara dengan Pegawai Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Zambrizal pada tanggal 09 Januari 2020, diketahui bahawa :

“apabila permohonan dikabulkan dan persyaratannya telah terpenuhi maka kami pihak perizinan akan membuatkan izinnya dan memperoses berkas-berkas untuk pembuatan surat izin tersebut”.

Dari hasil observasi peneliti diketahui semakin banyaknya pengusaha burung walet ini bermunculan akan tetapi semakin tidak efektifnya pengawasan pengusaha tersebut sehingga semakin bebas pengusaha untuk mendirikan usaha tanpa pengurusan izin.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Faktor Internal

Selepas menjalankan penyelidikan, penulis mendapati beberapa yang dianggap penting, Dalam pelaksanaan permit pengurusan dan eksploitasi Sarang Swallow di Daerah Kepulauan Meranti Kepulauan Meranti District mengalami banyak halangan di lapangan. Faktor penghalang yang dihadapi oleh pihak Implementer ialah faktor sumber manusia (SDM), sumber mempunyai peranan penting dalam setiap organisasi untuk mengambil tindakan, seperti apa yang

dikatakan oleh Kepala Pelesenan Departemen Penanaman Modal dan One Stop Integrated Services (DPMPTSP) Kabupaten Tebing Tinggi Kabupaten Meranti Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Sutardi pada tanggal 8 Januari 2020, diketahui bahawa:

“jumlah pengusaha sarang burung walet ini semakin hari semakin bertambah sehingga tidak sebanding dengan jumlah pengawas yang ada saat ini. Jadi maklum saja bila tidak semua tempat usaha sarang burung walet terpantau dalam pengawasan kami”.

Juga dilihat dari pemerhatian pengarang di lapangan juga terdapat beberapa faktor lain iaitu kekurangan komitmen Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Daerah seperti sosialisasi, pengawasan dan penerapan sanksi yang ketat terhadap para pengusaha yang melanggar Peraturan Daerah ini. Kerajaan harus melakukan sosialisasi dan pengawasan secara rutin serta penerapan sanksi yang ketat dalam memberikan sanksi-sanksi untuk memberikan efek pencegahan kepada usahawan sarang menelan yang melanggar Peraturan Daerah.

2. Faktor Eksternal

Faktor luaran di sini berasal dari pemain perniagaan yang menguruskan sarang menelan, yang sejauh ini masih tidak mempunyai kebenaran untuk mengurus dan menguruskan sarang menelan. Wawancara dengan Pegawai Pelesenan Pejabat Pelayanan Pelaburan dan Setempat yang Terintegrasi (DPMPTSP) Kabupaten Tebing Tinggi Kabupaten Meranti Kabupaten Kepulauan Meranti, Tn. Zambrizal pada 8 Januari 2020, diketahui bahawa:

“Diantara kendala yang ada ialah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan peraturan daerah ini dan selalu mengabaikannya, kemudian terbatasnya lokasi untuk penengkaran yang ideal, sehingga masih banyak terdapat pengusaha yang belum memiliki izin usaha.”

Kekurangan kerjasama antara usahawan dan pelaksana sarang menelan sering menjadikan dasar tidak optimum. Kesedaran yang rendah tentang masyarakat atau badan yang menjalankan pengurusan dan pengurusan sarang menelan ialah rendah untuk menjaga pengurusan dan eksplotasi sarang menelan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan izin pengelolaan dan eksplotasi sarang burung walet di Kabupaten Meranti, Kabupaten Meranti, iaitu faktor internal dan luaran.

Untuk mencapai sasaran yang akan dicapai dari Peraturan Daerah ini, langkah-langkah yang diperlukan seperti bimbingan bersepadau, penyeliaan yang berterusan, memerlukan Permit Pengurusan dan Pengurusan Nest Swallow untuk mengendalikan pengusaha burung burung walet untuk membuat pentadbiran dan perintah teratur bagi pemilik bisnis terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Perizinan Manajemen dan Bisnis Sarang Swallow di Kabupaten Kepulauan Meranti, kesimpulan dan saran yang dapat mendukung dalam meningkatkan penerapan Manajemen dan Manajemen Sarang Swallow di masa mendatang, ialah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Dasar Kerajaan Tempatan untuk Pengurusan dan Pelaksanaan Sarang Swallow di Kabupaten Meranti Kepulauan masih tidak berjalan secara optimal, hasil kajian menunjukkan bahawa sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat hanya terbatas pada seminar sehingga tidak diketahui oleh seluruh masyarakat. Kurangnya pengawasan dan penerapan sekatan yang tegas di pihak pelaksana terhadap usahawan yang melanggar Peraturan Daerah ini sehingga masih banyak usahawan sarang burung walet yang tidak memiliki izin untuk mengurus dan mengeksplorasi sarang menelan.
2. Faktor-faktor penghalang dalam Pelaksanaan Manajemen dan Pengelolaan Sarang Swallow di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Meranti termasuk faktor internal, kekurangan sumber daya manusia (HR) dalam melaksanakan peraturan-peraturan seperti sosialisasi, pengawasan dan penerapan sanksi yang ketat dari pelaksana terhadap para pengusaha yang

mengelola dan mengendalikan sarang menelan. melanggar Peraturan Daerah ini, faktor luaran terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat atau lembaga yang menjalankan pengelolaan dan eksploitasi sarang menelan pada pentingnya izin untuk mengelola dan mengendalikan sarang menelan.

B. Saran

Dari penyelidikan yang telah dilakukan penulis dan masalah yang ditemui, penyelidik memberikan beberapa sebab yang diharapkan dapat dibina atau dapat digunakan sebagai input atau pertimbangan dari segi pelaksanaan izin pengelolaan dan eksploitasi sarang menelan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Cadangan yang boleh diberikan oleh penulis dalam kajian ini ialah seperti berikut:

1. Penyebarluasan Peraturan Daerah No 118 tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Bisnis Sarang Swallow diberikan kepada masyarakat yang lebih luas sehingga orang tahu dan memahami apa tujuan Peraturan Daerah ini dan untuk mengawasi pengelolaan dan pengelolaan sarang menelan sesuai dengan Peraturan Daerah.
2. Pengawasan pengurusan dan pengurusan sarang menelan harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, iaitu secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
3. Bagi Pelaksana sendiri harus menerapkan sanksi yang tegas kepada para manajer burung burung walet untuk meminimalkan pelanggaran Peraturan Daerah.
4. Bagi pengeksploen sarang burung walet, mereka yang ingin mengurus izin dan belum memperhatikan izin pengusaha untuk segera atau segera

mengurus izin usaha dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengelolaan Sarang Swallow. Sehingga pengurusan dan eksplorasi sarang menelan tidak melanggar ketentuan yang ada.

5. Kepada komuniti, khususnya komuniti Kepulauan Meranti, untuk mengambil bahagian dalam pengawasan pengurusan dan pengurusan sarang menelan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 118 Tahun 2018.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

a. Buku-buku

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Adam Kuper & Jesica Kuper. 2000. Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Rajawali Press.
- Ace Suryadi dan H. A.R. Tilaar, 1975. Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar, Bandung: PT. Remaja Roesda Karya.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Agus Purwanto, Erwan, 2012, Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta : Gava Media.
- Ahmad, Yani. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan. Daerah Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arthur G. Gedeian dkk. 1991. Organization Theory and Design. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Danim, Sudarwan. 2000. Transformasi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2008. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- _____. 2009. Kebijakan dan Evaluasi. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princeton University Press.
- Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah,, Grasindo, Jakarta.

- Ibrahim. 2004. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media Pressindo (Anggota IKAPI).
- Islamy, Irfan. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bina Aksara.
- Labolo, Muhamad, 2010, Memahami Ilmu Pemerintahan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lubis, Solly. 2007. Kebijakan Publik. Mandar Maju. Bandung.
- Lexy Moleong, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja.
- Mardalis. 2006. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi.
- Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP AMP. YKPN.
- Mardiasmo, 2002, “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”. Penerbit. ANDI, Yogyakarta.
- Muchsin, dan Fadillah. P. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik. Malang: Averroes Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. Budaya Organisasi. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nyimas Dwi Koryati;dkk. 2005. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. Yogyakarta : YPAPI
- Rasyid. 1997. Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan. Kepemimpinan, Watampone, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2004, Good Government (Pemerintahan yang baik); Bandung: CV. Mandar Maju.
- Steers, M Richard. 1985. Efektivitas Organisasi Perusahaan. Jakarta: Erlangga.
- Suharto, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Belajar:Yogyakarta

- Susanto, Astrid S. 1975. Pendapat Umum.Bandung:Bina Cipta.
- Syafiee, Inu Kencana, 2005, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara edisi 2 . Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 1974. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bumi Aksara: Jakarta

b. Dokumentasi

- Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pajak.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti No. 118 Tahun 2018 Tentang tata cara dan petunjuk pelaksanaan perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Adrian. 2016. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Izin Dan Retribusi Pengelolaan Dan Pengusahaan Burung Wallet di Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Jurnal. Universitas Riau.
- Afra Maya Sari. 2016. Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Wallet (Studi di Kecamatan Payung Sekaki). Jurnal. Universitas Riau.
- Raja Savika Rezki. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Wallet di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Jurnal. Universitas Riau.